

Tabloid



# Info Aceh

Menuju Masyarakat Informasi



## Angka Kemiskinan Terus Menurun



## Visi Misi PEMERINTAH ACEH 2017 - 2022

### Visi:

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani

### Misi:

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.



# Salam

## Kerja Keras Pemerintah Aceh Turunkan Angka Kemiskinan

**A**NGKA penduduk miskin di Aceh dari tahun ke tahun tercatat terus mengalami penurunan. Meski belum signifikan, Pemerintah Aceh terus bekerja keras melakukan intervensi lewat berbagai program dan fokus anggaran untuk menekan angka kemiskinan.

Tabloid Info Aceh edisi perdana tahun 2020 yang ada di tangan pembaca saat ini, turut menyajikan informasi terkini dan ulasan terkait program-program dalam percepatan penurunan angka kemiskinan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi paling ujung barat Sumatera ini.

Pemerintah Aceh berupaya keras menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk menurunkan angka kemiskinan. Juga meningkatkan produksi pertanian serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Seperti ditegaskan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sejak September 2018 hingga September 2019 jumlah masyarakat miskin di Aceh berkurang sebanyak 21 ribu orang. Meski demikian, Pemerintah Aceh masih menerima kritikan terkait capaian penurunan angka kemiskinan dari berbagai pihak.

"Angka kemiskinan turun saja kita masih dikritik, apalagi kalau naik. Untuk itu, kita akan bekerja lebih baik lagi tahun ini," katanya.

Menurut Nova, Pemerintah Aceh akan mengerahkan semua potensi untuk menekan angka kemiskinan lebih tinggi lagi. Tahun ini, dana APBA akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah UMKM.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga memperbanyak belanja di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi padi, dan pengolahan pasca panen. Nova mengaku akan mengangkat komoditas pertanian lainnya seperti jagung, kedelai dan nilam.

"Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah merangsang kemandirian produksi telur dan daging sapi serta unggas," jelas Nova.

Juga program pembangunan infrastruktur bidang pertanian seperti irigasi, untuk meningkatkan hasil panen petani. "Ini satu langkah yang kita lakukan untuk menekan angka kemiskinan karena salah satu ukuran kemiskinan adalah ketersediaan pangan terutama beras," bebernya.

Plt Gubernur Aceh, mengakui angka kemiskinan di provinsi berjuduk Serambi Mekkah ini, turunnya belum signifikan. Tahun 2019, penurunan angka kemiskinan hanya sekitar 0,6 persen, sehingga tahun 2020 diupayakan tingkat penurunannya lebih baik.

Nova melanjutkan, tahun 2020 angka kemiskinan diusahakan turun signifikan. Paling tidak, bisa sama dengan kemiskinan nasional.

"Saya terima semua kritikan tentang itu, demi peningkatan dan kerja keras lagi tahun ini. Kritikan, merupakan bagian demokrasi. Siapa saja bisa mengeluarkan pendapat. Tapi harus realistis karena angka kemiskinan menurun. Nah, apakah termiskin, atau tidak termiskin, itu masalah lain lagi," kata Plt Gubernur.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dalam rilis terbarunya pada 15 Januari 2020, mencatat capaian penting terkait dengan upaya Pemerintah Aceh, yakni, keberhasilan menempati peringkat ke-7 secara nasional, sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Aceh pada September 2019 sebesar 15,01 persen, atau turun 0,31 poin dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 15,32 persen. Jika dibandingkan September 2018, turun 0,67 poin, yang sebesar 15,68 persen.

Kepala Bappeda Aceh, Helvizar Ibrahim mengatakan faktor penurunan angka kemiskinan Aceh sebesar 0,31 persen itu, disebabkan antara lain, realisasi dana APBA yang mencapai di atas 90 persen dari pagunya Rp 17 triliun. Selainnya, kemiskinan Aceh turun akibat realisasi dana desa yang mencapai 99,9 persen dari pagunya Rp 4,9 triliun, serta berbagai sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

Hingga akhir tahun lalu, perputaran uang di desa lewat pembangunan melalui anggaran dana desa tahap III masih berlangsung. Sampai akhir tahun ini, kegiatan pembangunan di desa, dengan adanya dana desa itu masih berjalan.

Helvizar menyebutkan, dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanganan kemiskinan dan pengangguran yang akan dilaksanakan tahun ini, Pemerintah Aceh sangat optimis angka kemiskinan Aceh pada bulan Maret 2020 nanti, akan turun lagi, melebihi 0,2 persen.

Alasannya, banyak program yang akan dilaksanakan awal tahun ini dari sumber APBA, APBN, APBK dan dana desa. Seperti pencairan dana desa dilaksanakan pada minggu ketiga atau keempat bulan Januari ini, sehingga kegiatan pembangunan di desa terus bergulir tanpa ada jeda.

### Tabloid Info Aceh

Menuju Masyarakat Informasi

Gubernur Aceh	Pelindung
Wakil Gubernur Aceh	Pelindung
Sekretaris Daerah Aceh	Pelindung
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Pengarah
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Penanggung jawab
Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Pemimpin umum
Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Pemimpin Redaksi
Kepala Bidang Persandian	Dewan Redaksi
Kasi Hubungan Media	
Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sekretariat Redaksi
Kasubbag Hukum Kepegawaian dan Umum	
Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Asset	
Kasi Pengelolaan Informasi Publik	
Fesrianevalda, ST, M.Cs	Informasi Teknologi
Ricky Alfins, SE, MM	
Rahmad, ST	Photografer
Dharwandura, A.Md	
Rosma	Notulensi
Siti Sundari, SE	

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Alamat Redaksi: Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.  
Jl. STA Mahmudsyah No. 14 Kode Pos 23243 Banda Aceh.  
Email: diskominfo.acehprov.go.id

Redaksi

# Program Unggulan Pemerintah Aceh Turunkan Angka Kemiskinan

**P**ROGRAM-program unggulan yang digulirkan Pemerintah Aceh selama ini telah memberi kontribusi dalam menurunkan jumlah orang miskin di Aceh, dari 819 ribu pada Maret 2019 menjadi 810 ribu orang pada September 2019 lalu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Helvizar Ibrahim, kepada awak media, Kamis (16/1), menyikapi Profil Kemiskinan Aceh 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Rabu (15/1).

"Alhamdulillah, program-program unggulan Pemerintah Aceh telah menunjukkan hasil yang positif bagi penurunan jumlah orang miskin," kata Helvizar.

Sebelumnya, BPS Aceh merilis jumlah penduduk miskin pada September 2019 banyak 809.76 ribu orang, atau 15,01% dari seluruh penduduk Aceh. Angka ini berkurang 9.000 orang dibandingkan Maret 2019, yang masih 819 ribu orang atau 15,32%.

Artinya, angka kemiskinan Aceh turun 0,31% dalam kurun enam bulan terakhir, dan secara year on year, turun 0,67 poin dari angka 15,68% pada September 2018 menjadi 15,01% pada September 2019.

Menurut Helvizar, meski belum memuaskan pihaknya namun penurunan angka kemiskinan sebesar 0,67% itu membuat Aceh tercatat sebagai salah satu dari 10 provinsi yang penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Helvizar juga mengaku optimis Aceh akan sangat gesit mengejar ketertinggalannya, dan tak lama lagi Aceh tak lagi termiskin di Sumatera.

"Angka kemiskinan kita tinggal 15,01%, hanya terpaut 0,2% dengan

Bengkulu yang angka kemiskinannya 14,99% saat ini," ujarnya.

Selanjutnya Helvizar menjelaskan, program-program unggulan yang telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan tersebut, antara lain, bantuan beasiswa anak yatim-piatu, Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, penanganan fakir miskin dan anak terlantar, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pemasangan listrik gratis.

Helvizar juga menjelaskan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan juga memberikan kontribusi terhadap perbaikan angka kemiskinan, seperti pembukaan jalan akses ke daerah-daerah terpencil.

Membebaskan suatu daerah dari isolasi dan membangun konektivitas antarwilayah dapat mendorong akselerasi ekonomi di sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan di daerah, sambung mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh itu.

Pada sisi lain, lanjut Helvizar, penurunan angka kemiskinan Aceh juga karena kontribusi program-program nasional yang kian efektif, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/RASTRA, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan skema beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi penerima Program keluarga Harapan (PKH).

Hal lain yang dianggap Helvizar memiliki kontribusi penting dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh, yakni dana desa yang menggerakkan roda ekonomi di per-



desaan.

Pada tahun 2019, Aceh mendapatkan kucuran dana desa sejumlah Rp. 4,95 triliun dan akan terus meningkat tiap tahunnya.

Bahkan, kata Helvizar lebih lanjut, dana desa berpotensi mengalahkan jumlah dana otonomi khusus (Otsus) saat dana Otsus tersebut berkurang menjadi 1% dari alokasi dana DAU mulai tahun 2023.

Pemerintah Aceh sedang mendorong pemanfaatan dana desa agar lebih efektif meningkatkan pendapatan masyarakat di setiap desa.

"Kita tidak nafikan kontribusi program nasional terhadap angka kemiskinan Aceh, termasuk peran pemerintah kabupaten/kota" ujar

Helvizar sembari tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mengoreksi angka kemiskinan Aceh tersebut.

Efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah pusat, tidak terlepas dari adanya pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

"Kita telah memiliki Tool Monev 6 Tepat untuk memantau program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran," tutup Helvizar.

**Tools Monev**  
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, Hasrati yang dihubungi terpisah menjelaskan, Tool Monev 6 Tepat adalah instrument yang digunakan pihaknya dalam mengawal program penanggulangan kemiskinan Aceh, sejak 2019.

"Tools Monev 6T yang dimaksud, Tepat Desain, Tepat Modus, Tepat Lokus, Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan tepat jumlah. Tools tersebut dapat memandu para pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan mulai dari tepat program, tepat pelaksanaan, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlahnya," rinci Hasrati.

Jika tools ini dapat diberlakukan secara ketat dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota dan setiap pihak yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan di Aceh akan lebih laju lagi.

"Pemerintah Aceh dapat menetapkan target penurunan angka kemiskinan melebihi 2% per tahun sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia," kata Hasrati optimis. (\*)

## Aceh Peringkat 7 Nasional Penurunan Angka Kemiskinan

**PROVINSI** Aceh kembali mencatat prestasi yaitu turunnya angka kemiskinan yang secara nasional tercatat berada pada peringkat ke 7. Artinya, sekitar sembilan ribu lebih masyarakat Aceh keluar dari kategori masyarakat miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dalam rilis terbarunya pada Rabu, 15 Januari 2020, mencatat capaian penting terkait dengan upaya Pemerintah Aceh, yakni, keberhasilannya menempati peringkat ke-7 secara nasional, sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan.

Kepala BPS Aceh, Wahyudin, menyampaikan, prosentase penduduk miskin di Aceh pada September 2019

sebesar 15,01 persen, atau turun 0,31 poin dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 15,32 persen.

"Sementara, jika dibandingkan September 2018, turun 0,67 poin, yang sebesar 15,68 persen," kata Wahyudin.

Capaian tersebut menempatkan provinsi Aceh, sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan yaitu berada pada posisi ke 7 secara nasional.

Kepala Bappeda Aceh, Ir Helvizar Ibrahim di Banda Aceh, mengatakan faktor penurunan angka kemiskinan Aceh sebesar 0,31 persen itu, disebabkan antara lain, realisasi dana APBA 2019 yang mencapai di atas 90 persen

dari pagunya Rp 17 triliun.

Selainnya, kemiskinan Aceh turun akibat realisasi dana desa yang mencapai 99,9 persen dari pagunya Rp 4,9 triliun, serta berbagai sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

Hingga akhir tahun lalu, perputaran uang di desa lewat pembangunan melalui anggaran dana desa tahap III masih berlangsung.

"Sampai akhir tahun ini, kegiatan pembangunan di desa, dengan adanya dana desa itu masih berjalan," kata Helvizar yang didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani.

Helvizar menyebutkan, dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan

penanganan kemiskinan dan pengangguran yang akan dilaksanakan tahun ini, pemerintah Aceh sangat optimis angka kemiskinan Aceh pada bulan Maret 2020 nanti, insyaallah akan turun lagi, melebihi 0,2 persen.

Alasannya, banyak program yang akan dilaksanakan pada awal tahun ini dari sumber APBA, APBN, APBK dan dana desa.

"Kita upayakan penarikan dana desa tahap I sebesar 20 persen, dari pagunya Rp 5,04 triliun itu, bisa dilaksanakan pada minggu ketiga atau keempat bulan Januari ini, sehingga kegiatan pembangunan di desa terus bergulir tanpa ada jeda," pungkas Hervizar Ibrahim. (\*)



# APBA 2020 Fokus Pertumbuhan Berkelanjutan

“Pemerintah Aceh mengapresiasi seluruh perhatian terkait APBA 2020 dan memperhatikan semua masukan serta sepakat memastikan pelaksanaan APBA 2020 tidak kehilangan arah alias fokus.”



**Helvizar Ibrahim**  
Kepala Bappeda Aceh,

**P**EMERINTAH Aceh melalui intansi terkait terus bekerja ekstra untuk mewujudkan berbagai program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Drwan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi berjuduk Tanah Rencong itu.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh tercermin dalam setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) termasuk untuk alokasi yang telah disepakati pada tahun 2020.

“Pemerintah Aceh mengapresiasi seluruh perhatian terkait APBA 2020 dan memperhatikan semua masukan serta sepakat memastikan pelaksanaan APBA 2020 tidak kehilangan arah alias fokus,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, Helvizar Ibrahim di Banda Aceh beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan Pemerintah Aceh sudah sejak awal menyampaikan fokus atau arah kebijakan APBA 2020 yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang terintegrasi.

“Kita juga terus memperbaiki kualitas perencanaan sedini mungkin. Kita bertekad RAPBA 2021 harus lebih baik lagi. Mendagri juga sudah menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur menu program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan pada setiap level pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, arah atau fokus pembangunan tersebut sudah disampaikan sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), April 2019 dan dipaparkan pada penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun tentang APBA 2020.

Ia mengatakan APBA Tahun 2020 difokuskan untuk penyeleng-

garaan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan skala prioritas, berdasarkan enam prioritas pembangunan dalam RKPA 2020 yang telah diselenggarakan dengan 15 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, juga dengan RKP Nasional.

Helvizar menjelaskan, postur APBA 2020 sebesar Rp17,2 triliun ditopang oleh Belanja Langsung (BL) sebesar Rp9,7 triliun dan Belanja Tidak Langsung 7,5 triliun.

Dari Rp17,2 triliun hampir Rp5 triliun adalah dana transfer ke kabupaten/kota terutama dana otonomi khusus Aceh (DOKA), bagi hasil pajak dan dana hibah lainnya dan transfer ke sekolah berupa bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurut dia, kenaikan belanja pegawai bukan tidak tiba-tiba, tapi ada peralihan 11.600 guru SMA/SMK, plus guru SLB dari kabupaten/kota ke provinsi serta pengalihan pegawai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

Kepala Bappeda Aceh itu menambahkan, belanja publik dari BTL APBA 2020 juga banyak, mencapai 62,67 Persen atau Rp4,7 triliun dari seluruh BTL sebesar Rp7,5 triliun.

Helvizar mencontohkan, Belanja Tak Terduga (BTT) di BTL sebesar Rp118 miliar. BTT adalah dana

cadangan untuk mengantisipasi kejadian bencana yang sepenuhnya akan dipergunakan untuk masyarakat jika terjadi bencana.

Kemudian di BTL APBA 2020 juga memuat bantuan keuangan sebesar Rp 2,9 triliun untuk kabupaten/kota berupa DOKA yang dikelola Kabupaten/kota.

“DOKA ini harus dialokasikan untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen dan keagamaan 5 persen dan lain-lain keperluan, semuanya untuk kegiatan yang berorientasi pro rakyat yang dilaksanakan Kabupaten/kota dan dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh di forum Musrenbang,” katanya.

Helvizar juga menyebutkan bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota sebesar Rp 912 miliar dalam APBA 2020, yang juga digunakan oleh kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pro rakyat.

Selanjutnya ada bantuan sosial Rp 15,8 miliar yang merupakan Bantuan Sosial Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), dan bantuan sosial asistensi lanjut usia terlantar di kabupaten/kota. “Ini juga program pro rakyat yang juga sangat penting,” kata Helvizar.

Komponen berikutnya di BTL yang juga sangat penting adalah Hibah Rp712 miliar yang terdiri dari kegiatan hibah Panti Asuhan, Panti Lansia, Pramuka, kepemudaan, dan olah raga.

“Ini juga program penting untuk masyarakat yang dilaksanakan melalui dana APBA,” ujar Helvizar.

Sementara itu untuk Belanja Langsung (BL) APBA 2020 sebesar Rp9,7 triliun digunakan untuk tiga komponen yaitu belanja pegawai, modal dan barang serta jasa. “Juga banyak belanja publik, diantaranya belanja barang dan jasa Rp5,7 triliun dan belanja modal Rp2,7 triliun,” kata Helvizar

Sedangkan belanja pegawai di BL Rp 1,2 triliun. Pemerintah Aceh juga harus membayar honorarium tenaga honorer yang mencapai angka 9.000 orang lebih yang membutuhkan dana Rp592 miliar pada tahun 2020.

“Sekda Aceh menaruh perhatian tentang ini dan sedang melakukan upaya agar tenaga honorer ini punya tugas dan peran yang jelas, kita baru saja melakukan Desk untuk seluruh pegawai honor,” ujar Helvizar.

Helvizar juga menambahkan bahwa tenaga honor yang berjumlah 9.000 lebih itu didominasi yang paling banyak adalah Pamhut yang mencapai 1.900 orang, Satpol PP 800 orang, RSUDZA yang mencapai 1.500 orang, Dinas Pendidikan 500 orang, Dinas Pertanian dan Perkebunan sebanyak 350 orang, Dinas Pendidikan Dayah 400 orang, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) 190 orang dan lainnya.

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa didominasi pembelian bahan dan material sebesar Rp 512 miliar yang sebagian untuk kepentingan rakyat seperti bahan baku bangunan, bibit ternak, tanaman, bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan cadangan (ketahanan pangan), pakan ternak dan lainnya.

Kemudian untuk asuransi kesehatan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang mencapai Rp 480 miliar yang dalam perubahan akan dilakukan rekonsolidasi karena kekurangan dana akibat naiknya iuran. (ifd)



## 2018 – 2019 Pemerintah Aceh Kurangi Angka Kemiskinan 21.000 Orang

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh juga kalangan birokrat yang terus bekerja keras sehingga September 2018 ke 2019 Aceh bisa mengurangi angka kemiskinan sebanyak 21.000 orang.

“Tahun 2020 ini juga akan dilaksanakan upaya percepatan pembangunan rumah layak huni kembali,” tegas Nova.

Plt Gubernur Aceh juga akan mengerahkan semua potensi untuk menekan angka kemiskinan, lebih tinggi lagi.

Untuk itu, dana APBA tahun 2020 akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Juga memperbanyak belanja di sektor pertanian guna meningkatkan produksi padi, dan pengolahan

pasca panen, juga mengangkat komoditas pertanian lainnya seperti jagung, kedelai dan nilam.

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah merangsang kemandirian produksi telur dan daging sapi serta unggas. Pada kunjungan kerja kali ini Nova juga meresmikan penggunaan irigasi Kuta Tinggi, Kecamatan Badar, peresmian Wisata Ketambe, dan peresmian jembatan Rema, Gayo Lues.

Tidak hanya itu, juga peresmian jembatan Temangar, Gayo Luwes, penyerahan Rumah Layak Huni Rikit Gaib, Gudang Logistik Bencana Aceh Tengah, Gedung Samsat Aceh Tengah, dan Rumah Layak Huni Bebesen Aceh Tengah.

Juga peresmian Gedung Aula Pendidikan Bener Meriah, Rumah Layak Huni Pintu Rime, serta peninjauan Lokasi MTQ di Bener Meriah dan Jaringan Iri-

gasi Samalanga Bireun.

Di Kecamatan Badar Plt Gubernur Aceh juga meresmikan Daerah Irigasi Kuta Tinggi yang mengaliri 7.500 ha sawah. Proyek ini bernilai sekitar 7.5 miliar.

“Ini satu langkah kecil kita lakukan untuk menekan angka kemiskinan karena salah satu ukuran kemiskinan adalah ketersediaan pangan terutama beras,” pungkas Nova. (\*)

# Komitmen Pemerintah Aceh Sejahterakan Rakyat

“

Alhamdulillah ini memberikan nilai positif bagi Aceh secara nasional. Angka penurunan kemiskinan 0,61 persen ini lebih kurang hampir 9 ribu orang miskin berkurang di Aceh. Namun tentu tidak boleh berpuas diri.”

**Muhammad Iswanto, S.STP MM**  
Kepala Biro Humas dan Protokol  
Setda Aceh



**P**EMERINTAH Aceh konsisten dengan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat. Buktinya provinsi yang berada di ujung barat Pulau Sumatera ini kembali mencatatkan prestasinya terkait penurunan angka kemiskinan.

Bahkan berada pada peringkat ke tujuh secara nasional. Untuk tahun 2019 penurunan angka kemiskinan Aceh adalah 0,67 persen.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Iswanto, S.STP MM menyampaikan, pada tahun 2020 Pemerintah Aceh akan mengupayakan tingkat penurunan yang lebih baik lagi.

Sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT. Adapun cara yang akan ditempuh oleh Pemerintah Aceh, kata Muhammad Iswanto, selain memaksimalkan program-program unggulan.

Berbagai macam pola dan strategi akan dilakukan Pemerintah Aceh tahun 2020. Seperti membangun sinergitas antar lembaga, baik pusat maupun daerah, termasuk kontribusi pihak swasta.

Dengan begitu, maka diharapkan

akan memiliki dampak besar terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Aceh pasca konflik yang berkepanjangan dan musibah gempa dan tsunami, kata Muhammad Iswanto, sudah mulai menunjukkan perbaikan.

Dengan berbagai sektor yang digenjut dan sinergitas yang dibangun oleh Pemerintah Aceh, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pelibatan sektor swasta, kondisi penurunan angka kemiskinan sejak tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan.

Kalau melihat ke belakang, kata Iswanto, di tahun 2015 persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 17,08 persen. Kemudian di 2016 turun menjadi 16,73 persen, pada 2017 sebanyak 16,89 persen.

Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin terjadi penurunan, yaitu 15,97 persen, kemudian terakhir angkanya sudah berada 15,32 persen.

Muhammad Iswanto melanjutkan, dari 2017 sampai 2019 terjadi peningkatan penurunan angka kemiskinan. Terakhir sudah berkurang lagi 0,61 persen meskipun target awal adalah 1 persen.

“Alhamdulillah ini memberikan nilai positif bagi Aceh secara nasional. Angka penurunan kemiskinan 0,61 persen ini lebih kurang hampir 9 ribu orang miskin berkurang di Aceh. Namun tentu tidak boleh berpuas diri,” ujarnya.

Angka itu, diperkirakan bakal terus menyusut dengan berbagai upaya konkret yang digagas Pemerintah Aceh melalui Badan Pe-

rencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. Seperti disampaikan oleh Plt Gubernur, angka kemiskinan Aceh dapat diminimalisir hingga menyamai angka kemiskinan nasional.

Insy Allah, target tersebut dapat terwujud. Terlebih dengan suntikan dana desa tahun 2020 yang mencapai Rp5,1 triliun untuk 6.700 desa di Aceh. Sejak minggu pertama Februari ini, setiap desa di Aceh sudah bisa melakukan pencairan.

Percepatan tersebut, kata Muhammad Iswanto, adalah hasil dari respon dan sosialisasi yang begitu gencar dilakukan oleh Pemerintah Aceh di akhir 2019.

Sebagaimana diketahui, Plt Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh telah turun ke seluruh kabupaten/kota untuk menyosialisasikan dan berkoordinasi terhadap kendala apa saja yang dihadapi selama ini.

Seperti mengapa setiap tahun dana desa selalu terlambat, baru pada bulan Juni atau Juli dicairkan, bahkan selalu ada Silpa.

Alhamdulillah, dengan koordinasi dilaksanakan tahun lalu, dengan dukungan penuh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dana desa sudah ditransfer langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dan sudah mulai digunakan.

Dana desa ini juga punya andil turunkan angka kemiskinan. Bappeda juga mendorong melalui SKPA – SKPA yang lain seperti Dinas Perkim yang tahun lalu berhasil menyelesaikan 4 ribuan sekian rumah layak huni. Insy Allah pada 2020 pembangunan kembali dilanjutkan.

“Pemerintah Aceh melalui sejumlah SKPA telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ini,” terang Muham-

mad Iswanto.

Hal ini sebagaimana arahan dari Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu, seluruh SKPA harus ada program pengentasan kemiskinan.

Program unggulan lainnya adalah beasiswa kepada anak yatim dan fakir miskin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Dinas Pendidikan Dayah juga punya program kepada santri dayah, Dinas Syariat Islam juga punya program unggulan. Program-program tersebut juga akan dimaksimalkan di 2020.

Kemudian di Dinas Sosial juga banyak program unggulan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Bahkan informasinya, bantuan sosial kepada keluarga miskin tahap pertama tahun 2020 ini sudah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Aceh.

Sambil disalurkan, petugas di bawah koordinasi Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Alhudri, MM juga sangat intensif atas perintah Plt Gubernur Aceh langsung memonitor ke lapangan, termasuk berkoordinasi dengan Kadis Sosial kabupaten/kota untuk memverifikasi ulang KPM. Hasilnya dapat dilihat, setiap hari ada informasi bahwa sekian ratus orang mundur sebagai penerima PKH.

Lebih lanjut Muhammad Iswanto menambahkan, Pemerintah Aceh juga meyakini bahwa upaya penurunan kemiskinan tahun ini akan tercapai seiring dengan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tepat waktu, bahkan Aceh tercatat sebagai yang tercepat secara nasional.

Capaian ini, kata Iswanto patut diberikan apresiasi. Apalagi kalau melihat ke belakang, ada yang baru bulan Februari atau Maret disahkan. (msn)

## Kritik Jadi Motivasi Menekan Angka Kemiskinan

**BERBAGAI** kritik terkait capaian penurunan angka kemiskinan di Aceh menjadi motivasi untuk berkerja le-

bih baik lagi di tahun 2020. “Angka kemiskinan turun saja kita masih dikritik, apalagi kalau naik. Untuk itu, kita akan

berkerja lebih baik lagi tahun ini,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT, Senin (20/1).



Hal itu disampaikan Nova saat melakukan serah terima rumah layak huni kepada penerima di seluruh Aceh secara simbolis.

Serah terima rumah dilakukan secara simbolis kepada Sori Alias Sigalinging, Gampong Batu Mbekhong Kecamatan Badar, Aceh Tenggara. Penerima simbolis lain adalah Abu di Gampong Lukup Baru, Kecamatan Rikit Ghaib, Gayo Lues.

Dalam pemberian kunci rumah Plt Gubernur Aceh menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh tahun 2019 membangun 4.006 unit rumah dari target 5.000 lebih.

Tahun 2020 akan dibangun 5.700 unit lagi dan akan dimulai cepat, mulai Februari hingga akhir tahun 2020 bisa mencapai 10.000 rumah.

Nova mengingatkan agar Sori alias Sigalinging dengan istri dan dua anak-

nya memelihara rumah yang ada. Sori sambil menitikan air mata menyampaikan terima kasih ke pemerintah Aceh terutama kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Dalam sambutannya Plt Gubernur Aceh mengatakan bahwa pembangunan rumah layak huni ini yang dapat dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 4.100 unit dari 5000 unit yang direncanakan.

“Alhamdulillah meskipun sempat tertunda di 2018 karena berbagai hambatan teknis, tahun 2019 dapat terlaksana dengan sistem ekatalog,” ujar Nova Iriansyah.

Menurut Nova pembangunan rumah layak huni membantu penurunan angka kemiskinan periode Sep 2019, sebab salah satu hitungannya adalah masalah kebutuhan masyarakat non makanan termasuk kebutuhan perumahan. (\*)



# PKH Efektif Turunkan Angka Kemiskinan

**P**ROGRAM Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak 2007 silam menjadi salah satu andalan dalam menanggulangi kemiskinan, termasuk di daerah ujung paling barat Indonesia, yakni Provinsi Aceh.

Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin ini cukup memberikan dampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan.

Buktinya, berdasarkan data By Name By Address (BNBA) graduasi pusat per-tanggal 7 Januari 2020, sudah 18.903 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Aceh tergraduasi.

Graduasi ini adalah kondisi dimana penerima manfaat PKH, sudah bisa lepas dari bantuan yang diberikan pemerintah secara berkala, sebab dianggap sudah sejahtera atau mandiri secara ekonomi, dengan kata lain tidak lagi termasuk kategori keluarga miskin. Artinya, mereka sudah keluar dari garis kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh, Drs. Alhudri MM mengakui kehadiran program PKH di Indonesia, khususnya di Aceh sangat berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Program ini sangat baik sekali bagi penurunan angka kemiskinan. Saat ini ada beberapa kabupaten yang sudah tergraduasi. Artinya, sudah keluar dari batas garis kemiskinan. Angkanya ada sekitar 18 ribu KPM lebih, ini By Name By



“Program ini sangat baik sekali bagi penurunan angka kemiskinan. Saat ini ada beberapa kabupaten yang sudah tergraduasi. Artinya, sudah keluar dari batas garis kemiskinan. Angkanya ada sekitar 18 ribu KPM lebih, ini By Name By Address,”

**Drs. Alhudri MM**  
Kepala Dinas Sosial Aceh

Address,” kata Alhudri.

Jumlah graduasi KPM sebesar 18.903 apabila dikali 3 jiwa yang terdiri dari ayah, ibu dan satu orang anak, maka jumlah keluarga miskin di Aceh yang berkurang totalnya mencapai 56.000 jiwa.

“Itu kalau dikalikan tiga ya, sementara jumlah anggota keluarga tersebut bisa saja lebih,” ungkap Alhudri.

Dinsos Aceh, kata Alhudri, bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota terus bergerak untuk melakukan pengecekan terhadap keluarga penerima bantuan sosial PKH yang sudah merasakan manfaatnya.

“Kalau memang sudah mapan, maka tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah,” tegasnya. Artinya, penerima manfaat sudah mandiri dan PKH telah mengubah hidup mereka menjadi mapan. Dalam merealisasikan program pemerintah pusat dalam menurunkan ang-

ka kemiskinan ini, kata Alhudri, Pemerintah Aceh melalui Dinsos terus bekerja keras.

Lantas bagaimana dengan penerima manfaat yang sudah mapan? Mereka tentu akan terus diberdayakan, tentunya dengan program lainnya.

Kadis Sosial Aceh mencontohkan, ada salah satu kabupaten di Aceh yang penurunan angka kemiskinan cukup signifikan, yaitu Kabupaten Aceh Tengah mencapai 1.000 lebih.

Dengan kesadaran sendiri mereka tidak mau lagi menerima PKH, karena kehidupan secara ekonomi sudah mulai mapan. Apalagi sekarang ada kebijakan baru dilakukan berupa penempelan stiker 'kurang mampu' atau miskin di rumah keluarga penerima PKH.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari pengelola PKH di Aceh, ada fenomena penerima manfaat PKH menyatakan mengundurkan diri sebagai KPM, sejak adanya pe-

nempelan stiker keluarga miskin penerima PKH.

Laporan yang ia peroleh, bahkan saat petugas PKH mulai melakukan penempelan stiker tersebut, dari 3 KPM yang direncanakan rumahnya akan ditempel stiker satu diantaranya menyatakan mundur.

Bahkan ini dilakukan sebelum petugas sampai ke rumah yang bersangkutan. Sementara itu, jumlah penerima PKH tahun 2019 tahap I di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tercatat 295 ribu lebih.

Seiring dengan perjalanan waktu mengalami pengurangan karena tergraduasi. Penerima manfaat PKH, sudah bisa lepas dari bantuan yang diberikan pemerintah secara berkala.

Angka penurunan kemiskinan diprediksi akan terus bertambah, apalagi proses penempelan stiker masih berlangsung di seluruh Aceh. Pada tahap IV tahun 2019 lalu, jumlahnya sudah diangka 282 ribu. Kemudian pada tahap awal 2020 sudah 271, artinya sudah turun lagi.

“Mungkin nanti akan turun lagi karena stiker belum ditempel semua,” terangnya.

Lebih lanjut Alhudri menyebutkan, data awal yang digunakan dalam menentukan penerima manfaat PKH merupakan basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator yang diambil untuk menentukan kemiskinan juga berdasarkan indikator yang ditentukan BPS.

Kemudian, BPS mengeluarkan rilis bahwa pada September 2019, tingkat kemiskinan di Aceh mengalami penurunan sebesar 0,31 persen atau 9 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2019. Masih menurut data BPS, angka kemiskinan di Aceh jika dibandingkan year on year (September 2019 dibandingkan September 2018) mengalami penurunan sebesar 21 ribu orang.

“Saya juga mempertanya-

kan hal itu, karena data dari PKH itu data dari BPS. Bagaimana bisa menjadi dua sisi mata uang yang berbeda, padahal sumbernya sama,” ujarnya.

Alhudri juga mengatakan, karena basis data yang digunakan sama, maka akan mempermudah untuk mengukur penurunannya. Kemudian penurunan di kabupaten/kota, apabila diakumulasi persentasenya bisa mencapai 20 persen graduasi penurunan penerima PKH.

“Artinya apa, ada berkurang 20-30 persen orang miskin di Aceh yang dipotret oleh PKH. Hal ini mengkonfirmasi hasil penelitian Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsyiah Prof Dr Raja Masbar,” tuturnya.

Selain program dari pemerintah pusat, Kadis Sosial menyampaikan bahwa banyak sekali program dan kegiatan dilakukan Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh sudah menyusun roadmap dan perencanaannya, sehingga masyarakat Aceh betul – betul tidak hanya slogan penurunan angka kemiskinan itu.

Nah kemudian, di setiap instansi pemerintah semua program yang dilaksanakan muaranya adalah kepada masyarakat. Tidak ada yang tidak mengarah kepada masyarakat, semuanya ingin mensejahterakan masyarakat.

Begitu juga dengan Dinsos Aceh, program yang dijalankan ke depan tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi).

“Di Dinsos ini yang 26 PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ya kita ikuti itu, alurnya kita ikuti itu, tentu jangan sampai menyalahi aturan undang – undang,” demikian pungkas Kadis Sosial Aceh, Alhudri. (msn)

## Stiker "Tidak Mampu" di Rumah Penerima PKH

PEMERINTAH Aceh melalui Dinas Sosial melakukan pemasangan stiker 'Keluarga Tidak Mampu' di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH).

Pemasangan perdana secara simbolis dilakukan di Aceh Timur, tepatnya di Desa Seunebok Tengah PP, Kecamatan Idi Reyuek, Selasa (14/1).

Pemasangan stiker di rumah-rumah warga penerima PKH ini merupakan tahap I yang dilakukan di wilayah pantai timur utara, sejak Senin (13/1/2020) sudah dilakukan di K Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Utara. Untuk tahap II dilakukan di pantai barat selatan, dan tahap III di wilayah tengah tenggara. Total ada 17 kabupaten/kota yang memasang stiker di rumah penerima PKH.

Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri diwakili Kasie Jaminan Sosial Keluarga, Siti Khotijah berharap, dengan adanya pemasangan stiker ini akan adanya keterbukaan data penerima PKH serta dapat saling monitoring jika ada penerima PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga bagi keluarga penerima manfaat

(KPM) PKH yang mampu dapat secara sadar mengundurkan diri dari kepesertaan (graduasi).

“Tujuan memasang stiker ini untuk menyoroti apa yang selama ini disampaikan masyarakat ada penerima PKH yang tidak tepat sasaran,” kata Siti.

Dengan ditempel stiker ini di tiap-tiap rumah keluarga penerima manfaat PKH akan adanya ada efek malu bagi mereka yang memang bukan dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mau keluar dari penerima PKH.

Selain itu, setiap orang dengan terbuka dapat melihat siapa saja sebenarnya penerima manfaat dari PKH setelah adanya stiker di masing-masing rumah penerima, sehingga siapapun boleh komplain dan melaporkan jika ada penerima manfaat PKH ini yang memang tidak tepat sasaran kepada pendamping PKH dan dinas sosial kabupaten/kota setempat.

Karena, kata Siti, dengan keluarnya keluarga mampu dari kepesertaan penerima manfaat PKH secara langsung mereka keluar dari basis data terpadu (BDT) yang merupakan data



kemiskinan di Aceh, sehingga angka kemiskinan di Aceh dapat ditekan.

“Untuk itu tolong bantu kami untuk sama-sama memonitoring kalau

ada penerima PKH yang memang betul dapat dikeluarkan tolong laporkan ke pendamping dan dinas sosial kabupaten/kota,” kata Siti. (\*)

# Memberantas Kemiskinan dengan Dana Desa

**DANA** desa merupakan program nasional yang digulirkan sejak tahun 2015. Alokasi dana desa setiap tahun di Aceh meningkat tajam, dari Rp 1,7 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 5,05 triliun pada tahun 2020.

Jika dipersentasikan, jumlah dana desa saat ini 60 persen dari dana otonomi khusus (Otsus) Aceh, dimana dana desa sebesar Rp 5,05 triliun, sedangkan dana Otsus mencapai Rp 8 triliun.

"Ini satu potensi anggaran yang akan kita kelola dengan baik, dari perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelola keuangan. Kita ingin kelola dengan baik. Kita perbaiki mekanismenya. Soalnya, selain dana otsus, yang bisa mendorong turunnya kemiskinan adalah dana desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (DPMG), Azhari Hasan, SE M.Si dalam wawancara khusus dengan kru Tabloid Info Aceh di Kantor DPMG, pekan lalu.

Sesuai dengan regulasi, ada dana Otsus yang dikembalikan ke kabupaten/kota sebanyak 40 persen. Nah, dari 23 kabupaten/kota, hanya tujuh daerah dana Otsus lebih besar dari dana desa.

Artinya, sebanyak 16 daerah memiliki dana desa yang lebih besar dibandingkan dengan dana Otsus. Misalnya saja Kota Banda Aceh dan Sabang. "Ini artinya, ada satu potensi anggaran yang besar, dikelola oleh desa, bisa dimanfaatkan mengurangi kemiskinan," tandasnya.

Azhari memaparkan, untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang besar itu, maka pihaknya membenahi beberapa hal.

Pertama, dari sisi perencanaan. Pihaknya harus memastikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di desa selesai tepat waktu. Paling lambat bulan Desember harus sudah tuntas.

Selain itu, dalam pengalokasiannya pemerintah juga harus memastikan bahwa ada dana desa yang diperuntukkan menanggulangi kemiskinan.



“Kita ingin kelola dengan baik. Kita perbaiki mekanismenya. Soalnya, selain dana otonomi khusus, yang bisa mendorong turunnya kemiskinan adalah dana desa.”

**Azhari Hasan**  
Kepala DPMG Aceh

"Alhamdulillah, ini salah satu prioritas yang diminta oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Desa. Di situ disebutkan salah satu program prioritas desa adalah penanggulangan kemiskinan," kata mantan Kepala Bappeda Aceh ini.

Nah, sekarang pihaknya mencoba melakukan pembinaan dan pendampingan, sehingga aparat desa mau memanfaatkan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, ada lima urusan penanggulangan kemiskinan, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi, infrastruktur, dan sosial. Dana desa harus digunakan untuk lima bidang tersebut guna mengurangi kemiskinan. "Dalam anggaran kemarin kita sudah minta supaya dana desa itu diarahkan ke situ. Makanya kita kawal," tandasnya.

Saat ini, kata Azhari, pihaknya hanya meminta diprioritaskan pada dua hal, yakni kemiskinan dan stunting. Inilah masalah besar yang dihadapi warga Aceh. Untuk membenahi berbagai persoalan tersebut, dari sisi perencanaan pihaknya membenahi dua hal.

Pertama, harus dipastikan bahwa supaya tersedia dana di masing-masing desa untuk penanggulangan kemiskinan. Kedua, dari sisi perencanaan, APBG harus selesai tepat waktu, sehingga di bulan Januari dana desa sudah mulai cair.

Jika pencairan cepat dilakukan, kata Azhari, maka akan pu-

nya dampak besar. Sebagaimana diketahui, ada tiga tahapan pencairan dana desa. Tahap pertama sebesar 40 persen. Nah, jika dana 40 persen itu bisa cair pada Januari, maka lebih Rp 2 triliun uang akan beredar di desa sejak bulan Januari-Maret. "Ini memberikan peluang untuk membuat ekonomi masyarakat cepat hidup," terangnya.

Selama ini uang baru beredar di desa pada bulan Juni. Oleh karena itu, pihaknya meyakini bahwa jika semua desa bisa mencairkan anggaran tepat waktu, maka ekonomi di kampung akan menggeliat.

Dengan demikian, desa

punya cukup waktu untuk melakukan berbagai kegiatan. Kualitas kegiatan pun akan lebih baik. Di sisi lain, jika terlambat, maka potensi-potensi penyimpanan pun besar, karena waktu pengerjaan yang sempit dan terburu-buru.

"Kemarin tahun 2019, ada beberapa desa yang anggarannya baru bisa dicairkan pada bulan Desember, tentu ini sangat kita sayangkan," ungkap Azhari.

Dengan mempercepat penyaluran, membuat aktivitas ekonomi di desa semakin cepat dan cukup waktu, sehingga kualitas pembangunan bisa lebih baik. Selain itu, karena cukup waktu, maka pada akhir tahun kemungkinan tidak ada Silpa. "Kalau sekarang ada Silpa. Setiap tahun ada Silpa, sejak tahun 2015," sebutnya.

## Tenaga Pendamping Berperan

Secara nasional, ada tenaga pendamping yang membantu mulai dari proses perencanaan, realisasi, hingga pertanggungjawaban dana desa. Tenaga pendamping ada di berbagai level, mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga

provinsi. Seluruhnya berjumlah 2.800 orang di seluruh Aceh.

"Tugas pemerintah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap apa yang mereka lakukan. Dana desa besar sekali potensinya, makanya kita benahi aspek perencanaan dan keuangannya. Apabila keduanya sudah kita benahi, maka dampaknya akan terasa," tandasnya.

Selama ini penetapan anggaran desa paling cepat bulan Maret atau April. Mestinya, paling lambat bulan Desember. Oleh karena itulah, Pemerintah Aceh membuat gerakan dengan turun langsung ke lapangan.

Sekda Aceh, dr. Taqwallah memimpin rombongan untuk menyosialisasikan penggunaan dana desa.

"Kita harus memakai dana tersebut sesuai prioritas dan kami sudah membuat gerakan. Gerakan kami lakukan dengan turun langsung ke lapangan bersama Sekda. Gerakan tersebut sangat efektif. Gerakan pertama kami lakukan untuk mengubah kebiasaan," tandasnya. Sejauh ini, kata Azhari, sudah terlihat perubahannya meskipun belum optimal. (sk)



## Mendorong Lahirnya BUMDes Kreatif

**KEPALA** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (DPMG), Azhari Hasan, SE M.Si meyakini pemanfaatan dana desa tahun ini akan lebih optimal. Begitu pula dengan tahun-tahun selanjutnya. Apalagi pihaknya berencana membuat menu-pilihan penggunaan dana desa pada tahun 2021. "Tahun 2021 untuk menurunkan kemiskinan kita sudah menyiapkan menu dan desa yang akan memilih sesuai kebutuhan mereka," kata Azhari.

Dikatakannya, saat ini DPMG Aceh sedang menyiapkan menunya. Pi-

haknya juga akan membuat kesepakatan dengan DPMG kabupaten/kota tentang menu alternatif, sehingga terbuka inspirasi bagi masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Saat ini seringkali keinginan untuk memberantas kemiskinan dikaitkan dengan modal kerja. Padahal, kata Azhari, belum tentu modal yang diberikan kepada seseorang bisa menjauhkan dirinya dari kemiskinan. Ada warga yang memang butuh modal, tetapi ada juga warga yang butuh keterampilan.

Ada pula yang warga yang masih harus diberikan keterampilan sekaligus

modal untuk keluar dari garis kemiskinan.

Salah satu cara lain menggeliatkan ekonomi masyarakat adalah dengan memberdayakan badan usaha milik desa (BUMDes). "Sekarang hampir semua desa punya BUMDes. Masalahnya sekarang, sebagian besar BUMDes belum punya aktivitas. Yang ada cuma simpan panjam. Ini kan sangat konsumtif. Sehingga belum memberikan dampak yang kuat memberdayakan ekonomi masyarakat," tandasnya.

Namun, ada sejumlah gampong di Aceh yang boleh disebut berhasil dalam mengembangkan BUMDes-nya. Mereka kreatif mengelola BUMDes sehing-

ga menjadi motor penggerak ekonomi desa. Di Meureudu, Pidie Jaya, ada desa yang berhasil mengelola air bersih. Rumah-rumah warga berhasil dipasang instalasi air bersih.

Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang, ada BUMDes yang kini sudah menjadi sentra produksi madu. Otomatis sangat membantu meningkatkan roda ekonomi masyarakat.

"Kalau desa punya potensi wisata, maka BUMDes bisa menggerakkan pariwisata. Kalau di desa ada potensi air bersih, maka BUMDes ini yang mengelola air bersih," tandas Azhari.

Pihaknya juga akan terus mendampingi masyarakat mengembangkan BUMDes yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain. (sk)



# Aceh Siap Sambut Investasi Rp 42 Triliun dari UEA

**P**ELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menargetkan dana investasi dari Uni Emirat Arab (UEA) sebesar US\$3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun. Hal itu diketahui setelah Uni Emirat Arab menyepakati rencana investasi US\$22,89 miliar atau setara Rp314,9 triliun (kurs Rp14.000) dengan Indonesia. Kesepakatan dicapai setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke negara itu beberapa hari lalu.

Nova Iriansyah mengatakan, pihak UEA berencana mengucurkan dana tersebut untuk sektor properti antara lain yang menunjang pariwisata seperti hotel atau resort di Kota Sabang dan Banda Aceh, Industrial Estate di Ladong [Kabupaten Aceh Besar], dan Islamic Development Estate di Banda Aceh.

Namun begitu, Nova berharap investasi UEA juga menyorot sektor lainnya yang terbuka lebar di Aceh seperti pada bidang agrobisnis, halal food hingga petrochemical.

Sesuai arahan Presiden, kata Nova, Pemerintah Aceh akan menjemput bola dan mempermudah seluruh proses investasi masuk sesuai perundang-undangan.

"Lebih cepat lebih baik, kita berharap 2020 sudah mulai perizinan," kata Nova, Rabu (15/01/2020).

Kesepakatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab meliputi kerja sama antar-pemerintah dan business

to business di bidang pendidikan, pertanian, pendidikan agama, investasi dan berbagai bidang lainnya.

Kerja sama tersebut disepakati senilai US\$22,89 miliar dengan partisipasi UEA di dalamnya sebesar 33 persen atau senilai US\$6,8 miliar. Seluruhnya terbagi atas lima proyek antar-pemerintah (g to g) dan 11 proyek bisnis (b to b).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan UEA meminta untuk berinvestasi di sebuah pulau dengan udara bersih dan pantai yang bagus.

Menurut Luhut, investasi di Aceh rencananya akan dilakukan oleh adik Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed yaitu Syekh Hamid.

"Pihak UEA dan pemerintah Provinsi (Aceh) akan membicarakan ini, alasan mereka ingin berinvestasi di Aceh karena jarak terbang dari Abu Dhabi kira-kira hanya 5 jam," katanya melalui keterangan resmi.

Disbudpar Sambut Baik Rencana Investasi UEA Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Aceh, Jamaluddin, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik kabar investasi tersebut.

Ia mengatakan, sektor pariwisata Aceh memang membutuhkan pembenahan yang hanya dapat dilakukan dengan modal besar.

"Seperti di Sabang, potensi pariwisatanya cukup



besar sedangkan hotelnya yang berbintang masih belum ada, jadi butuh infrastruktur hotel di sana," ujar Jamaluddin.

Selain hotel, Kota Sabang juga disebut masih membutuhkan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata lainnya terma-

suk pembangunan bandara komersial. Hal itu dikarenakan selama ini jalur tempuh ke Sabang hanya mengandalkan jalur laut.

"Selama ini di Sabang tidak ada lapangan penerbangan yang representatif, mungkin perlu dukungan untuk bandara internasional,

sekarang kan belum ada bandara, yang ada hanya bandara milik TNI-AU," ujarnya.

Selain Sabang, sejumlah lokasi wisata lainnya juga masih membutuhkan pembenahan yang menelan banyak biaya. Seperti lokasi wisata Danau Lut Tawar di Aceh Tengah yang perlu dikelola dengan lebih baik lagi.

"Jadi biar turis mau tinggal lebih lama di Take-nton, tentunya harus dikemas destinasi itu lebih baik seperti dengan membuat wahana-wahana permainan di danau, seperti halnya di Ancol," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Dr. Aulia Sofyan, mengatakan ada empat kawasan yang dipersiapkan untuk menerima investasi UEA, yaitu Kota Sabang, Aceh Tengah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Aceh Besar. "Kita juga telah diundang oleh Pak Luhut untuk membahas dengan mereka," kata Aulia. (\*)

## Pemerintah Aceh-UEA Bakal Bertemu

**PEMERINTAH** Aceh dan Uni Emirat Arab (UEA) bakal bertemu membahas rencana investasi di Aceh. Hal itu diketahui setelah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melakukan

pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (30/1) di Jakarta. Pertemuan dengan

Menteri Luhut digelar untuk menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke UEA beberapa waktu lalu untuk membahas rencana investasi UEA di Indonesia, khususnya di Aceh.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luhut, Nova menjelaskan berbagai potensi investasi di Aceh, seperti perumahan dan perhotelan di wilayah Sabang dan Banda Aceh, kawasan pariwisata Pulau Banyak, Simeulue dan Dataran Tinggi Gayo.

Nova juga menjelaskan investasi di KEK Arun dan pembangunan jaringan pipa gas dari Lhokseumawe.

Dari penjelasan tersebut, kata Nova, Menko Luhut langsung menghubungi Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail al-Mazrouei guna mengatur waktu yang tepat untuk kembali bertemu dan membicarakan kelanjutan rencana investasi itu.

"Artinya, dalam waktu dekat Pemerintah Aceh akan bertemu dengan Menteri Energi dan Industri UAE, bertemu juga dengan adik Pengeran Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, dan Managing Director Abudhabi Investment Authority," ujar Nova yang dalam pertemuan tersebut didampingi staf khususnya, Iskandar. (\*)



# Aceh Perjuangkan Proyek KA Besitang-Aceh Masuk PSN

**PELAKSANA** Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT memperjuangkan proyek pembangunan kereta api (KA) Aceh - Besitang, Sumatera Utara masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dan meminta dukungan Menteri Perhubungan RI di Jakarta.

"Kita mengharapkan adanya dukungan berupa surat komitmen Menteri Perhubungan terkait pengusulan PSN tersebut, serta dukungan dari Komisi V DPR RI khususnya mereka dari Daerah Pemilihan Aceh," kata Nova Iriansyah saat melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di ruang rapat Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2020.

Dalam kesempatan tersebut Plt. Gubernur Aceh yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, menyampaikan biaya pengadaan tanah jalur KA tersebut disediakan oleh Lembaga Manajemen aset Negara (LMan).

Karena itu Nova berharap agar Kemenhub dapat mendukung upaya ini dengan menerbitkan Surat Komitmen dari Menteri Perhubungan sebagai salah satu syarat pengajuan proyek KA Aceh untuk masuk sebagai PSN dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Nova juga berharap agar pengembangan perkeretaapian Aceh dapat didukung dengan penataan kelembagaan melalui pembentukan unit kerja Balai Teknik Perkeretaapian di Aceh sehingga koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Balai Teknik Perkeretaapian selaku perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan dapat lebih



sinergis lagi.

Hal ini mengingat Pembangunan KA Aceh yang mencapai 428 Km membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dan kolaboratif antara Kemenhub dengan Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga rentang kendala koordinatif yang selama ini jauh dapat dipangkas.

Pengerjaan proyek pembangunan jalur rel kereta api Trans Sumatera, segmen 1 Besitang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara sampai kawasan Sungai Liput Kabupaten Aceh Tamiang, dilaporkan hampir selesai. Pembangunan tahap pertama sepanjang 35 kilometer yang dimulai tahun 2017 itu diperkirakan akan selesai pada tahun ini.

Pada pembangunan tahap pertama ini, petugas pengerjaan mengalami kendala pembebasan lahan yang seharusnya merupakan rute lama miliknya PT. Kereta Api Indonesia.

Kendala itu dikhawatirkan

akan juga akan terjadi pada pembangunan segmen dua lanjutan jalur menuju ke Kota Langsa.

Untuk mengantisipasi itu, Plt Gubernur telah menyurati Presiden Jokowi agar menjadikan pembangunan jalur kereta api tersebut masuk dalam Kawasan Proyek Strategis Nasional.

Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Kerja I Provinsi Aceh dan Wilayah Kerja II Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi wilayah kerja pembangunan tengah menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait masuknya pembangunan tersebut sebagai salah satu proyek dalam Kawasan Strategis Nasional.

"Semua persyaratan teknis yang dibutuhkan agar pembangunan kereta api ini bisa masuk ke PSN sudah disiapkan dan diantarkan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," kata Nova.

Untuk itu, Pemerintah

Aceh sangat mengharapkan adanya dukungan berupa surat komitmen Menteri Perhubungan terkait pengusulan PSN tersebut, serta dukungan dari Komisi V DPR RI khususnya mereka dari Dapil Aceh.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan secara prinsip, pihaknya tengah saat melakukan persiapan untuk pelaksanaan pembangunan kereta api tersebut.

Selain itu, kata Menteri Budi Karya, terkait anggaran pembangunan tahap 2 segmen Lintas Sungai Liput -Langsa juga telah tersedia.

Pembangunan segmen 2 yaitu sepanjang 45 km spur. Rencana pelaksanaan dengan pembiayaan Tahun Anggaran Multiyears 2020 - 2022 dengan rencana pagu anggaran Rp 2,8 Triliun. Sementara lahan yang perlu pembebasan yaitu sepanjang 42 km.

Anggaran pembangunan tahap 2 ini lebih besar dari kontrak multi years tahun 2017

- 2020 yang pagu anggarannya Rp 1,3 triliun. Pada tahap pertama pembangunan spur dilakukan sepanjang 34 kilometer.

Hanya saja, pembangunan tahap 1 dengan status lahan menggunakan jalur eksisting (bekas lahan PT.KAI) kecuali pada seksi Sungai Liput yang 3 kilomernya lahannya masih harus dibebaskan.

Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, Ruslan Daud, yang juga ikut pada pertemuan itu, mengatakan pertemuan dengan Menteri Budi Karya merupakan langkah kongkrit agar pembangunan kereta api lanjutan segmen 2 tersebut dapat segera terealisasi serta masuk sebagai salah satu PSN.

"Pertemuan dengan Bapak Menteri Perhubungan ini merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan kereta api di Aceh sehingga dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat secepat mungkin," ujar Ruslan. (\*)

## Buka Rute Penerbangan Kualanamu-Rembele-SIM

**DALAM** kesempatan tersebut Plt. Gubernur Aceh juga mengharapkan bantuan Menteri Perhubungan untuk membuka rute penerbangan dari Bandara Kuala Namu - Rembele (Bener Meriah) - Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar PP yang diperkirakan memiliki permintaan perjalanan (demand) yang cukup baik serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah tersebut.

Bandara Rembele saat ini

memiliki panjang runway (landasan pacu) 2.250 x 30 meter dan dapat didarati pesawat sekelas ATR 72.

Selain itu, Plt Gubernur juga mengharapkan dukungan Kemenhub untuk mengaktifkan kembali penerbangan Kualanamu - Sabang PP yang sempat dioperasikan oleh maskapai Garuda Indonesia, namun telah berhenti beroperasi beberapa waktu yang lalu karena berbagai faktor.

Penerbangan ini sangat

penting untuk dibuka kembali untuk mendorong Sabang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Di sektor transportasi laut, Plt Gubernur berharap agar Kemenhub dapat memberikan perhatian terhadap Pelabuhan Calang, Aceh Jaya yang diproyeksikan menjadi pelabuhan ekspor CPO dengan membangun breakwater sehingga operasional pelabuhan tidak terkendala dengan gelombang

tinggi pada saat-saat cuaca ekstrem.

Pada akhir pertemuan, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran Kemenhub dalam memberikan bantuan teknis terhadap berbagai isu perhubungan di Aceh, khususnya bantuan teknis dan suksesnya pelaksanaan tender terhadap 3 unit kapal Roro yang dilakukan pengadaan oleh Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020. (\*)

# Senyum Bahagia Sori Terima Bantuan Rumah

**M**ATANYA tak dapat menyembunyikan rasa bahagia. Saat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tiba di depan rumahnya, Sori alias Sigalingging, langsung menyongsongnya.

Bersama sang istri, dan Virgo anaknya, Sori langsung menyalami Plt Gubernur Aceh, yang datang didampingi istri, Dyah Erti Idawati, Senin (20/1/2020). Plt Gubernur mengunjungi Desa Batu Mbe-kong, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, untuk menyerahkan rumah bantuan.

"Apa kabar pak Sori," sapa Plt Gubernur ramah. Sori terlihat canggung, tak menjawab. Sori hanya tersenyum sembari mengangguk ke arah orang nomor satu di Aceh itu.

"Hari ini saya serahkan kunci rumah ini kepada Pak Sori dan keluarga. Rumah ini adalah bantuan dari Pemerintah Aceh untuk diterima dengan ikhlas. Semoga setelah ini kehidupan bapak dan keluarga menjadi lebih baik dan anak-anak dapat beraktivitas di rumah dengan nyaman," ujar Nova.

Nova menjelaskan, rumah yang ditempati Sori dan keluarga ini merupakan bagian dari 4.006 unit Rumah Layak Huni (RLH), yang dibangun Pemerintah Aceh pada tahun 2019.

"Semoga bermanfaat. Tolong dijaga kebersihannya, MCK nya juga harus selalu bersih, sehingga rumah menjadi sehat. Sehingga Virgo dan Abelia dapat tumbuh menjadi

anak yang sehat dan cerdas," sambung Nova.

"Saya dan keluarga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Aceh, terutama kepada Bapak Plt Gubernur Nova Iriansyah, yang telah memberikan rumah layak huni kepada saya dan keluarga. Insya Allah, saya akan menjaga dan merawat rumah ini dengan sebaik-baiknya, sekali lagi terima kasih," jawab Sori singkat.

Sori alias Sigalingging adalah satu dari total 144 keluarga kurang mampu di Kabupaten Aceh Tenggara, yang mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni dari Pemerintah Aceh tahun 2019 lalu. Tahun 2020 ini, program pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu masih akan terus berlanjut.

Pemerintah Aceh akan membangun sebanyak 138 unit di Aceh Tenggara.

Sori alias Sigalingging adalah salah seorang penerima rumah layak huni bantuan Pemerintah Aceh, melalui Dinas Perkim, yang dibangun pada Tahun 2019, di Desa Batu Mbe-kong Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

Plt Gubernur menjelaskan, tahun 2020 ini pembangunan rumah layak huni akan terus dilanjutkan. "Lebih dari 5 ribu unit rumah akan kita bangun di tahun 2020," jelasnya.

Nova menegaskan, rumah adalah salah satu variabel yang akan terus diintervensi untuk mendongkrak kesejahteraan keluarga. Sebelumnya, Nova juga meninjau Irigasi Kuta



Tinggi dan menandatangani prasasti, tanda telah selesainya pembangunan irigasi tersebut.

Irigasi Kuta Tinggi dibangun oleh Dinas Pengairan untuk peningkatan jaringan irigasi di Kecamatan Kuta Tinggi Kabupaten Aceh Tenggara. Proyek senilai Rp7,4 miliar ini bersumber dari dana APBA Tahun 2019.

Sumber air irigasi ini berasal dari Sungai Lawe Bulan. Irigasi Kuta Tinggi akan mengairi areal persawahan warga seluas 1.497 hektare, yang tersebar di 15 desa di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Badar dan Kecamatan Babussalam.

"Dengan mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Irigasi Kuta Tinggi. Ini adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh untuk membangun ketahanan pangan. Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan hasil pertaniannya, terutama padi," harap Nova.

Sementara itu, Sekretaris Desa Kuta Tinggi Suhardi yang turut hadir di lokasi tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas selesainya pembangunan irigasi Kuta Tinggi.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Aceh, kepada Pak Nova dan seluruh jajaran. Sebagai petani kami ti-

dak susah lagi. Sebelum ada irigasi ini, banyak teman-teman kami yang beralih menanam komoditas lain karena susah-susah akses mendapatkan air. Tapi sekarang kami sudah bisa menanam padi dua kali setahun," ujar Suhardi.

Dari Irigasi Kuta Tinggi, Plt Gubernur dan rombongan bertolak ke kawasan wisata Ketambe, untuk meresmikan sarana dan prasarana pariwisata Ketambe. Ada empat proyek yang diresmikan di kawasan ini, yaitu gapura, gedung pertemuan, mushalla dan panggung pertunjukan.

"Saya mengimbau kita semua, terutama masyarakat Ketambe agar terus menjaga setiap batang pohon di lokasi wisata ini agar kesejukan alamnya terus lestari," imbau Plt Gubernur.

Selanjutnya, Plt Gubernur bertolak ke Kabupaten Gayo Lues. Di daerah berjudul Negeri Seribu Bukit ini, Nova meresmikan beroperasinya jembatan rangka baja Rema. Proyek senilai Rp7,2 miliar ini bersumber dari dana Otonomi Khusus tahun 2019.

Di Gayo Lues, Plt Gubernur juga menyerahkan kunci rumah layak huni kepada Abu, warga Desa Lukup Baru Kecamatan Rikit Gaib. Acara ditandai dengan penggantungan pita. Di dalam rumah, Plt Gubernur dan istri dipeusijuek oleh tokoh adat setempat.

Tahun 2019 lalu, Pemerintah Aceh membangun Rumah Layak Huni sebanyak 50 unit. Tahun 2020 ini, program rumah layak huni akan berlanjut di Gayo Lues. Sebanyak 188 unit rumah akan segera dibangun awal Februari tahun ini. (\*)

## Penerima Rumah Layak Huni: "Terima Kasih Pak Plt Gubernur"

**RESPON** penerima rumah layak huni tipe 36 dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh di Kecamatan Samadua, Aceh

Selatan, mengaku cukup puas karena sejak lama berharap, dan baru tahun 2019 terwujud.

"Alhamdulillah tahun ini sudah dibangun dan sudah selesai," kata Nurul, peneri-

ma rumah layak huni, pekerja bangunan di Desa Gadang, Dusun Ingin Jaya, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan.

Kata Nurul, dia menyampaikan terima kasih kepada Plt Gubernur dan Pemerintah Aceh karena tahun 2019, dia bersama istri dan tiga anaknya sudah memiliki rumah permanen.

"Terima kasih Pak Gubernur, dan saya berharap, Pak Gubernur tetap memberi perhatian kepada kaum yang membutuhkan. Caranya bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran," pinta Nurul didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa, Kecamatan Samadua, Budi Suhendra.

Penerima lainnya, Misrizal, asal Desa Bale, Kecamatan Samadua, yang bekerja se-

bagai pemanjat pohon kelapa. Dia mengaku baru kali ini menerima bantuan rumah dari pemerintah. Sebelumnya dia tinggal di rumah yang sangat sederhana bersama keluarga.

"Syukur Alhamdulillah, akhirnya saya peroleh rumah ini," kata Misrizal spontan di rumah yang sedang dalam proses penyelesaian.

Kata Misrizal yang didampingi Keuchik Desa Balai, tanah yang dibangun rumah layak huni miliknya tersebut berasal dari tabungannya sebagai pemanjat pohon kelapa dan kerja serabutan di desa itu.

"Saya dan keluarga sudah tenang sekarang. Saya tidak menduga bisa memperoleh bantuan rumah seperti ini dari Pemerintah Aceh," pungkas Misrizal. [\*]



# Pertama di Sumatera, 100 Persen Desa di Aceh Teraliri Listrik

**PELAKSANA** Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT mengapresiasi keberhasilan PT PLN melakukan sambungan listrik ke 6.497 gampong yang ada di provinsi paling ujung barat Indonesia ini.

Untuk itu, Nova mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung kerja-kerja PLN, terutama untuk menyukseskan sambungan Listrik Rumah Tangga di tahun 2022 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Gubernur, dalam sambutannya pada acara peresmian 100 persen Listrik Desa, di Aula PT PLN Wilayah Aceh, Kamis (23/1/2020).

"Hari ini kita mendapatkan berita gembira lagi dari PLN, bahwa saat ini seluruh Gampong di Aceh sudah teraliri listrik. Dalam kesempatan ini, saya mengajak semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten untuk mendukung upaya PLN melakukan sambungan Listrik Rumah Tangga, di tahun 2022 mendatang," ujar Nova.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur juga mengapresiasi dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat yang telah membantu dan mendukung kerja-kerja PLN sehingga program 100 persen desa teraliri listrik ini sukses terselenggara.

"Alhamdulillah, kerja sama dengan PLN cukup bagus, kerja sama kita dengan

masyarakat juga cukup bagus. Semoga ini bisa terus kita pertahankan. Saya paham betul kendala-kendala PLN menembus gampong-gampong di pedalaman Aceh. Satu persen terakhir ini memang cukup berat. Sekali lagi terima kasih PLN," kata Nova.

Nova menambahkan, dari 15 program unggulan Pemerintah Aceh yang berjalan saat ini, salah satunya adalah Aceh Energi, yang tidak hanya fokus pada upaya meningkatkan produksi migas di Aceh, tapi juga mendorong agar PT. PLN (Persero) agar mampu mengatasi masalah ketersediaan energi listrik di Aceh.

"Langkah yang kita lakukan, antara lain, mengajak investor untuk berinvestasi mengembangkan berbagai sumber energi listrik di daerah ini. Kita juga mendorong PT. PLN terus memperbaiki jaringan transmisinya agar penyaluran listrik kepada masyarakat berjalan lebih lancar," sambung Nova.

Direktur Bisnis PT PLN Regional Sumatera, Wiluyo Kusdiharto menjelaskan, bahwa cakupan 100 desa teraliri listrik di Aceh ini adalah yang pertama di Sumatera.

Saat ini, PLN terus membangun pembangkit listrik di sejumlah wilayah di Aceh, diantaranya di Arun dan Kabupaten Nagan Raya.

"Aceh adalah daerah tingkat provinsi pertama di Sumatera yang seluruh desa-



nya telah dialiri listrik. In-sya Allah, di tahun 2022 kita sudah surplus. Bahkan, jika beberapa pembangkit yang sedang kita kerjakan ini rampung, maka 4 tahun setelahnya Aceh sudah memiliki daya listrik 1.160 megawatt (MW). Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Aceh dan seluruh elemen di Aceh agar program ini segera selesai," harap Wiluyo.

Wiluyo menambahkan, saat ini PLN juga sedang membangun jaringan dari Pangkalan Susu Sumatera Utara ke Arun, dari Arun ke Sigli dan dari Sigli ke Banda Aceh. Jika ini selesai, maka kendala jaringan yang selama ini terjadi

dapat segera diminimalisir.

"Saat ini PLN mengerjakan sejumlah proyek kelistrikan di Aceh, dengan nilai investasi mencapai Rp19,4 triliun. In-sya Allah, ke depannya pelayanan kelistrikan di Aceh akan jauh lebih baik. Jadi, Pak Gubernur bisa terus mengundang investor. Pak Nova fokus ke bisnisnya, biar kami yang fokus ke penyediaan listriknya," terang Wiluyo.

Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Aceh, berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberi dukungan apapun yang diperlukan oleh PLN, untuk mewujudkan cakupan 100 persen Listrik Rumah Tangga di tahun 2022.

Di sisi lain, Plt Gubernur juga mengingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi Aceh jika seluruh jaringan PLN selesai dan kebutuhan energi Aceh tercukupi, yaitu efisiensi.

"Saat jaringan selesai, kita akan dihadapkan pada tantangan baru, yaitu menggunakan listrik secara efektif dan efisien. Sehingga energi dapat dimanfaatkan dengan bijak," sambung Nova.

"Pemerintah Aceh bersama pemkab dan pemko se-Aceh harus menjadi sebuah tim yang kompak dan solid. Tak ada orang atau pemerintahan yang bisa menyelenggarakan pembangunan seorang diri. Tidak ada superman, tapi semua elemen harus bersatu menjadi supertim yang solid, agar pembangunan berjalan sukses," kata Nova.

Di akhir saambutanannya, Plt Gubernur Aceh kembali menegaskan, bahwa Pemerintah Aceh sangat terbuka dengan kritik. Nova bahkan menganalogikan kritik sebagai sebuah motivasi dan suplemen agar pemerintahan berjalan tetap pada arah dan jalurnya.

"Pemerintah Aceh tidak anti kritik karena kritik adalah suplemen yang akan memotivasi aparaturnya untuk bekerja lebih baik lagi. Namun kebencian yang bermuara pada fitnah, bullying, hoax dan fakenews, adalah hal yang berbeda, dan tidak akan mengubah apapun," ujar Nova berpesan.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur juga sempat melakukan video conference dengan Bupati Aceh Singkil Dulmusrid. Dalam pemaparannya, Dulmusrid menjelaskan, saat ini aliran listrik sudah dimanfaatkan warga oleh warga di daerahnya untuk mendukung usaha pertukangan dan usaha kecil seperti membuat es batu. (\*)

## Pemerintah Aceh Aliri Listrik Gratis untuk Ribuan Masyarakat Miskin

**PEMERINTAH** Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) akan melanjutkan program pemasangan listrik gratis bagi masyarakat miskin di Aceh setelah di tahun 2019 lalu program tersebut telah 'mengerangi' 5.844 rumah warga.

Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur, mengatakan pada tahun ini pihaknya akan kembali menyalurkan listrik gratis untuk 920 rumah tangga miskin di enam kabupaten.

Enam kabupaten itu adalah Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Barat Daya dan Aceh Tenggara.

"Masing-masing rumah itu akan dipasangkan listrik dua ampere," kata Mahdinur, Rabu (8/1).

Ia merinci bahwa untuk kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen dan Gayo Lues, akan disalurkan listrik bagi 200 rumah. Sementara ada 80 sam-

bungan listrik bagi masyarakat Aceh Barat Daya serta 40 rumah di Aceh Tenggara.

Mahdinur menyebutkan Pemerintah Aceh secara bertahap akan melakukan penyaluran listrik gratis bagi seluruh masyarakat miskin di seluruh Aceh.

Ia menargetkan pada tahun 2022 mendatang seluruh masyarakat di Aceh sudah dapat menerima akses energi listrik. "Harapan kita bantuan pemerintah tersebut bisa tepat sasaran," kata Mahdinur.

Penyediaan listrik bagi keluarga miskin merupakan salah satu program Pemerintah Aceh yaitu Aceh Energi.

Selama dua tahun Pemerintahan Aceh Hebat, hampir 100 persen rumah sederhana di Aceh telah dialiri listrik, di samping juga beberapa kontrak industri energi yang telah ditandatangani. [\*]



# Kemiskinan Tak Bisa Dilihat dari Satu Sudut Pandang

## Program Mikro By Name By Address Solusi Kemiskinan Aceh

“...Strategi penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, multiproblem, multidimensi, dan penanggulangannya juga menjadi multisolusi atau solusi beragam.”



-- Prof Dr Raja Masbar, M.Sc,  
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah

**I**SU kemiskinan Aceh kembali menjadi hangat dibicarakan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru mengenai kemiskinan. Hingga awal 2020, Aceh masih menempati provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam se-Indonesia. Per September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01 persen.

Peneliti dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof Dr Raja Masbar, M.Sc memandang persoalan kemiskinan di Aceh tercipta karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.

Karena itu, kemiskinan di Aceh tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang semata, melainkan dipengaruhi banyak faktor. Karena itu dibutuhkan solusi yang beragam sesuai dengan fakta di lapangan.

"Beberapa hasil penelitian yang mengangkat tentang strategi penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, multiproblem, multidimensi, dan penanggulangannya juga menjadi multisolusi atau solusi beragam," ujar Prof Raja Masbar kepada Info Aceh, Minggu (2/2/2020).

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Provinsi Aceh mencapai 2.199.787 jiwa/530.714 rumah tangga (ruta). Untuk Desil 1: 540.170 jiwa/101.392 ruta, Desil 2: 558.342 jiwa/126.313 ruta, Desil 3: 626.827 jiwa/162.181 ruta, Desil 4: 474.448 jiwa/140.828 ruta.

Kategori penduduk paling miskin dalam Desil I dinilai menjadi kelompok paling membutuhkan perhatian penanganannya.

Menurut Raja Masbar para akademis telah melakukan berbagai penelitian lapangan untuk mencari sebuah formula yang efektif untuk upaya pengurangan kemiskinan di Aceh.

"Akademisi bertugas dan berkeajiban memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga legislatif dan eksekutif, para akademisi memberikan saran berdasarkan kajian ilmiah melalui penelitian empiris," ujarnya.

Saat ini data rumah tangga miskin di Aceh khususnya yang masuk dalam kategori Desil 1, sudah memadai. Para keluarga atau rumah tangga miskin ini sudah diketahui secara data by name dan by address.

Artinya keberadaan mereka mudah terdeteksi dan kesulitan hidup yang mereka hadapi juga sudah terdapat dalam catatan penelitian.

"Artinya tidak perlu lagi dibuat penelitian tentang kemiskinan untuk diusulkan program kepada Pemerintah. Karena data rumah tangga miskin by name by address sudah ada, tinggal diperbaiki "inclusion error" dan "exclusion error" nya," papar Raja Masbar.

Menurut Raja Masbar inclusion

error adalah kelompok rumah tangga mampu masuk dalam list warga miskin, sedangkan exclusion error rumah tangga miskin tidak masuk dalam list warga miskin. Data inilah yang perlu diperbaiki dan diverifikasi.

Kemudian data tersebut distandardisasi dan disetujui semua pihak (BPS, Pemda, Dinas). Berikutnya adalah membuat "program solusi" bagi RT Miskin tersebut dengan menerapkan pola solusi sederhana.

Solusi tersebut berupa Program Mikro (RT)-Direct Impact atau per rumah tangga. Tapi dengan catatan semua pihak harus ada "political will" untuk menyediakan dana untuk kelompok miskin (desil 1-4).

Kekuatan dan kelebihan dari program by name by address ini adalah adanya keterlibatan masyarakat miskin yang notebennya sebagai penerima manfaat sehingga apa pun bantuan yang digulirkan tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima.

Misalkan ada seorang janda di Meunasah Alue, Kabupaten Bireuen yang punya tanggung jawab besar sebagai petani penggarap, tidak punya lahan, solusinya pemerintah membeli dua petak sawah untuk digarap janda tersebut.

Contoh lainnya kondisi hidup Bapak Abdullah Isa (48) dengan jumlah tanggungan 3 orang di Banda Aceh, tapi masih menempati rumah tak layak huni, solusinya pemerintah membangun rumah layak huni lewat program rumah duaafa.

Solusi sederhana inilah yang disebut Prof Raja Masbar sebagai solusi rumah tangga miskin di Aceh keluar dari kungkungan kemiskinan. Sebab, Program Mikro (RT) tersebut memberi pengaruh langsung bagi rumah tangga miskin untuk memperbaiki kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.

Meskipun begitu, kata Raja Masbar, tawaran solusi tersebut bukan tanpa kendala. Menurut penelitian adanya intervensi dari para elite desa menjadi satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

Sebab hal ini juga berkaitan dengan struktur kekuasaan di desa, kaitan keluarga, kaitan bisnis, kaitan politik (kelompok) teman dan akumulasi aset.

Kendala lainnya program-program penanggulangan kemiskinan tidak diundang-undangkan dalam lembaran negara maupun diqanunkan, dan selalu berubah-ubah saat ganti kepemimpinan.

Fakta ini merujuk pada beberapa program pengurangan kemiskinan yang sudah dijalankan pemerintah, selalu berubah-ubah dari era ke era kepemimpinan presiden.

Seperti Program Jangka Panjang (Beasiswa Bidik Misi, BPJS), Program Jangka Pendek (Raskin, BLT), Program Dampak Tidak Langsung (Indirect Impact)-Program dari kebijakan makro (aggregate), misalnya pengembangan UKM, Dana Desa, Program Dampak Langsung (Direct Impact)-Program dari kebijakan mikro (RT).

Selain itu, kata dia, juga ada program makro (praktis) atau program sapu jagad. Misalkan ada pro-

### Program Solusi Jangka Pendek

- Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mengurangi beban pengeluaran RT Miskin, tapi menciptakan ketergantungan
- Program Beras untuk masyarakat miskin (raskin). Mengurangi beban pengeluaran RT Miskin, tapi menciptakan ketergantungan.
- Program padat karya. Mendapatkan pendapatan segera
- Program pelayanan kesehatan gratis bagi ibu bersalin. Beban Biaya Kesehatan bagi RT Miskin berkurang.
- Program tarif listrik rendah bagi RT miskin. Mengurangi beban pengeluaran RT Miskin.

### Program Solusi Jangka Panjang

- Program beasiswa bidik misi. Dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang.
- Kartu Indonesia Sehat – jaminan kesehatan. Mengurangi beban RT Miskin dalam jangka panjang.
- Kartu Indonesia pintar. Dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dalam satu generasi mendatang.
- Program rumah duaafa. Membantu menyediakan basic need kebutuhan dasar bagi RT Miskin.
- Program Bantuan operasional sekolah. Dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dalam satu generasi mendatang

gram Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertanyaannya adalah apakah orang miskin terlibat dalam pengambilan KUR. Kalau tidak terlibat, berarti tidak ada mengurangi perubahan hidup rumah tangga miskin.

Contoh lainnya dana desa yang didianggarkan hampir Rp 1 miliar per desa. Persoalannya apakah rumah tangga miskin ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa tersebut. Apabila tidak dilibatkan, maka tidak akan ada perubahan bagi hidup rumah tangga miskin.

"Kalau tidak terlibat, uang banyak tapi tidak akan mengurangi jumlah penduduk miskin," jelasnya.

Oleh karenanya Prof Raja Masbar mengusulkan agar setiap program pengurangan kemiskinan harus melibatkan rumah tangga miskin.

Selain itu program pengurangan kemiskinan perlu diundang-undangkan dalam lembaran negara atau diqanunkan sehingga lebih mudah dan terukur dalam pelaksanaannya.(sr)

## Data Kemiskinan BPS Harus Direvisi

**PENELITI** dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc mengungkapkan, data kemiskinan di Aceh yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai mengalami error hingga 20 persen.

Penilaian itu diperoleh saat tim lapangan Raja Masbar mengkonfirmasi ulang data kemiskinan dari BPS Aceh itu di Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya. Angka error didapat berdasarkan basis data BPS yang diambil sebagai sampel. Adapun jumlah sampel yang digunakan untuk dua kabupaten tersebut mencapai 200 sampel.

Kata Raja Masbar, saat diteliti ulang ia menda-

ptakan fakta adanya error yang terjadi, seperti rumah tangga tidak miskin masuk dalam basis data miskin (inclusion error) dan rumah tangga miskin tidak masuk dalam basis data kemiskinan (exclusion error).

"Fakta di lapangan menyangkut dengan inclusion error dan exclusion error. Tapi ini berdasarkan sampel data ya, bukan basis data," ujarnya.

la juga menyebut kesalahan yang terjadi bukan murni kesalahan dari pihak BPS. Sebab, BPS memperoleh data-data mengenai kemiskinan di tingkat desa, melalui aparat pemerintah setempat.

Berbicara inclusion error dan exclusion error ini bisa terjadi, penyebab

utamanya yaitu masih ada kepentingan dalam struktur kekuasaan di desa (power structure in village), seperti adanya kaitan keluarga, bisnis, politik, dan akumulasi aset.

"Dalam pemilihan rumah tangga miskin itulah terjadi, errornya banyak. Mungkin BPS belum berani mengeliminir error-error yang ada," jelasnya.

Di sisi lain, Prof Raja Masbar mengatakan data yang dirilis BPS untuk sementara waktu tetap dapat dipergunakan. Namun dengan catatan data-data tersebut harus direvisi, agar dapat dijadikan dasar dalam perencanaan program-program pemerintah, terutama penanganan kemiskinan. (\*)

# Penggunaan Anggaran Harus Lebih Diefektifkan

**B**ERBICARA masalah kemiskinan di Aceh, tak lepas dari masih kurang berdayanya sebagian penduduk Aceh secara ekonomi. Hal itu terasa ironi ketika dikorelasikan dengan kurcun anggaran ke Aceh sejak tahun 2007 dengan nilai yang terhitung signifikan.

Di satu sisi, political will Pemerintah Aceh sudah ada, namun belum dibackup secara konsisten oleh seluruh komponen masyarakat di Aceh atau bahkan di luar Aceh.

Hal itu diungkapkan Pengamat Ekonomi dan Pembangunan yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB Unsyiah), Dr. Mukhlis Yunus, SE MS kepada Info Aceh, Senin (3/2/2020).

Menurutnya, salah satu langkah yang harus dilakukan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan itu adalah dengan mengefektifkan penggunaan anggaran yang turun ke Aceh dengan mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Kini yang diperlukan adalah reorientasi peman-

**“**Kini yang diperlukan adalah reorientasi pemanfaatan anggaran terutama dana Otsus pada sektor sektor produktif. Sementara yang konsumtif yang sifatnya tak membuka lapangan pekerjaan dan tidak mendorong investasi sebaiknya ditinjau kembali”

**Dr. Mukhlis Yunus, SE MS**  
Pengamat Ekonomi dan Pembangunan



faatan anggaran terutama dana otonomi khusus (Otsus) pada sektor sektor produktif. Sementara yang konsumtif yang sifatnya tak membuka lapangan pekerjaan dan tidak mendorong investasi sebaiknya ditinjau kembali,” ujar Mukhlis Yunus.

Ditambahkannya, saat ini political will Pemerintah Aceh ke arah sektor produktif itu belakangan ini sudah bagus, namun diperlukan back-up oleh seluruh komponen masyarakat. Untuk itu investasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dan juga pihak pihak lain yang ingin men-

nam investasi di Aceh, perlu dibuka pintu khusus.

Selama ini kesan tarik menarik di anggaran, membuat indikator produktif itu sering terabaikan. Selain itu eksekutif punya niat ke arah sana secara konsisten, hanya saja tidak menggiring ke arah yang produktif.

Akibatnya, peningkatan anggaran nyaris tak signifikan dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan ekonomi produktif yang kurang tumbuh dan berkembang secara patut.

Sementara di sisi lain secara lebih khusus, untuk

memberi manfaat yang lebih fokus kepada pengurangan kemiskinan, Dana Otsus yang besar, perlu dilakukan reorientasi.

Artinya, pemerintah perlu melakukan identifikasi kebutuhan percepatan pembangunan melalui kegiatan investasi.

Karena, dengan investasi dimungkinkan adanya pengembalian, dimungkinkan juga adanya penyerapan tenaga kerja, menghasilkan produk produk yang dibutuhkan masyarakat.

Dan itu secara paralel akan mendorong pendapatan karena terbukanya lapangan pekerjaan. Hal itu juga secara langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan.

"Kemiskinan muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan, hingga berakibat kurangnya pendapatan, dan berujung pada status sosial dengan kategori miskin," tandas Mukhlis Yunus seraya menambahkan, sebesar apapun dana yang ada, kalau tidak dikelola atau diarahkan kepada hal yang produk-

tif, maka akan sia sia.

"Anda lihat saja keluarga Teuku Markam yang terkenal punya asset luar biasa, tapi kini bergeser, karena tak diproduktifkan. Itu contoh kecil yang jadi penyebab, karena tak diarahkan ke sektor produktif," ungkapnya.

Maka pendapatan yang ada sering terbelanjakan untuk kepentingan konsumtif. Itu jelas tak ada nilai tambah dan jelas tak ada nilai perbaikan pendapatan ekonomi.

Akhirnya tak bertumbuh pendapatan rakyat yang ujung ujungnya malah tidak mengurangi jumlah penduduk miskin. "Itu indikator utama seperti itu, oleh karenanya dibutuhkan political will pemerintah dan dukungn semua elemen masyarakat dengan tidak malah merongrong. Untuk upaya perbaikan ekonomi itu kita punya saluran yang langsung, misalnya dana aspirasi yang kita giring ke arah perbaikan keekonomian atau hal-hal yang produktif. Hanya saja ada atau tidak kemauan untuk itu, terutama dari pemilik dana Aspirasi itu sendiri," terangnya. (ns)

## Perlu Kohenrensi Project dengan Program Pengentasan Kemiskinan

**S**ALAH satu yang dituntut oleh rakyat kepada Pemerintah saat ini adalah komitmen untuk mendorong sektor investasi, tentu saja semua pihak juga harus ikut mendorongnya dengan memberi spirit. Sehingga pemerintah lebih punya tekad untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, dan tentu saja berdampak pada pengurangan angka kemiskinan ke depan.

Jadi sudah saatnya bergeser dari fokus pembangunan infrastruktur yang konsumtif, dengan pembangunan infrastruktur, tapi infrastruktur yang signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan ekonomi daerah.

"Bukan kita menyalahkan infrastruktur, karena itu juga penting, tapi kini saatnya membangun infrastruktur yang produktif yang bisa mendorong pertumbuhan investasi. Itu yang harus mendapat prioritas pertama," sebutnya.

Secara kasat mata terlihat pada kurcun Dana Otsus yang begitu besar dalam rentang waktu yang terhitung panjang, seakan kurang produktif.

Karena itulah dibutuhkan reorientasi dan penataan ulang kebu-

tuhan infrastruktur produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Memang ada pengurangan kemiskinan di Aceh, tapi jujur saja belum signifikan dibanding dengan kurcun dana yang ada. Artinya, indikasi kemajuan ada, namun belum seperti yang diharapkan. Itu langkah positif, tapi tetap dibutuhkan percepatan percepatan khusus, sebab kemiskinan adalah penyakit kronis, yang tak boleh diobati dengan pengobatan normatif, namun perlu tindakan cepat, taktis, terukur, efektif dan harus intens. Atau semacam task force," jelas Mukhlis Yunus.

Task force diperlukan, dengan multi disiplin, multi sektor yang harus terintegrasi. Artinya, setiap project yang dibangun itu harus diukur sampai ke impactnya.

"Jadi input, output, roses, out come, dan impact harus diukur, sehingga, yang paling penting, bagi siapapun evaluator, tidak hanya melihat da-

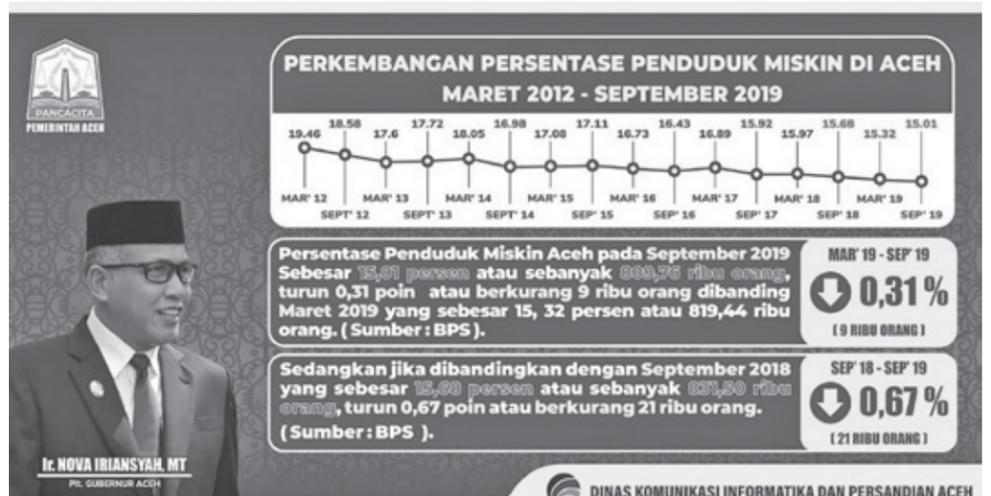
lam dimensi project semata, tapi diperlukan evaluasi terhadap program. Sangat mungkin, project itu sukses, tapi jarang atau kurang konsis dengan keberhasilan program. Yang penting program, misalnya program pengentasan kemiskinan dengan membagi beras ke masyarakat, serta membangun rumah dua-

alam," katanya. Berasnya terealisasi, rumah juga teralisasi, tetapi tidak mengurangi jumlah penduduk miskin. Ini jelas ada some think wrong kemiskinan, tetap saja tak tereliminir. Ini tidak konsisten antara program dengan project. Seharusnya ada korelasi positif antara project dengan program, hingga tujuan akhir akan tercapai. Nah jangan program ke kanan, justru project lebih awal tergiring ke kiri.

Untuk itulah dibutuhkan koherensi antara project dengan program pengentasan kemiskinan misalnya. Tapi saya melihat bahwa itikad baik Pemerintah Aceh sudah ada, tinggal support moral; dari semua pihak, termasuk para perencana misalnya.

Yang perlu kejelian dalam melihat identifikasi masalah, dengan cara turun ke lapangan perlu mengevaluasi indikator, dengan menentukan key performance indicator (KPI), bagi kemiskinan misalnya.

Dalam hal ini, masyarakat juga memperlihatkan warna asli, dengan tidak dilandasi kepentingan politik misalnya. "Ini pure ecomic dan butuh tindakan yang ekonomi pula yang diback-up secara politis. Bukan malah kegiatan politis diback-up oleh kepentingan ekonomi. (ns)



# Aceh Smart Province Inovasi Kemudahan Pelayanan Publik

**P**EMERINTAH Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Kominsa) dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) telah melakukan launching 'Aceh Smart Province' pada 12 Desember 2019 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Sebelumnya, juga telah digelar FGD sebanyak dua kali pada 4 Oktober dan 2 Desember lalu.

Launching 'Aceh Smart Province' ini ditandai dengan peluncuran buku rencana induk Aceh Smart Province yang dilakukan oleh pihak Unsyiah, Pemerintah Aceh, dan Dinas Kominsa.

Aceh smart province ini ditandai dengan terintegrasinya data dalam kerangka pelayanan publik di Aceh. Tujuannya menjadikan Aceh semakin layak huni dengan bantuan pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Aceh.

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, berharap kehadiran Aceh Smart Province (ASP) dapat berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak harus memahami dan menjalankan fungsinya untuk membangun kebersamaan serta berbagi manfaat pihak yang berkolaborasi.

"Pemerintah Aceh ingin menjadikan Aceh sebagai provinsi yang layak huni, punya fasilitas umum yang modern, serta dapat memberi berbagai kemudahan dalam pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga memberi kemudahan pelayanan," kata Plt. Gubernur Aceh, diwakili Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata.

Dijelaskan Wira, Rencana Induk Aceh Smart Province lebih operasional dari salah satu Program Unggulan Pe-

merintahan Aceh, yakni Sistem Informasi Aceh terpadu (SIAT), sebuah Sistem Informasi Aceh yang Terintegrasi.

Wira menyebut, Aceh SIAT sekarang sudah dapat dilihat karena Rencana Induk Aceh Smart Province ini. Ini akan menjadi rujukan dalam implementasi pada level lebih teknis, seperti pembahasan business process pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sampai pada pengembangan inovasi serta aplikasi pelayanan publik sesuai kebutuhan yang ada di masing-masing SKPA.

"Aceh Smart Province ini diorientasikan sebagai konsep pembangunan inovatif yang modern namun tetap dalam bingkai syariah sesuai dengan predikat dan semangat pembangunan Aceh," lanjut Wira.

Dimensi pembangunan Aceh Smart Province menggunakan 6 pendekatan dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Dimensi-dimensi ini juga merupakan sinyal bahwa kita telah mulai memasuki era industri 4.0, dimana semua hal harus dilakukan berbasis data, memanfaatkan artificial intelligent, internet of things, serta dikelola berbasis Big Data.

Untuk melaksanakan keenam dimensi tersebut diperlukan komitmen bersama saling bekerja sama menyukseskan program-program yang sudah disusun sesuai kerangka kerja yang ada di RPJMA.

Dalam kerangka ini, setiap pengembangan aplikasi teknologi informasi maupun teknologi lainnya tidak lagi terpisah satu-sama lain. Setiap SKPA dapat saling terkoneksi, berbagi data, berbagai pakai, dan untuk selanjutnya diharap-



kan semua proses pembangunan dapat dilakukan secara cepat saji, transparan, akuntabel, efektif serta efisien.

Dengan demikian, kita akan mengurangi kesalahan-kesalahan data yang fundamental, mengurangi inefisiensi, pemborosan, dan menghemat biaya. Intinya pelayanan publik kita harus cerdas, cermat, efektif, efisien, mudah, murah dan menyenangkan. Itulah filosofi tujuan Aceh Smart Province.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, B.HSc MA mengatakan, ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, pada 16 Oktober 2018 terkait bidang penelitian dan lainnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Pemerintah Aceh kemudian menggandeng perguruan tinggi yaitu Unsyiah termasuk ITS untuk bersama-sama menyusun road map Aceh Smart Province ini.

Ini sejalan dengan salah satu dari 15 program unggulan pemerintah Aceh, yaitu Sistem Informasi Terpadu (Aceh SIAT).

Marwan menjelaskan, saat ini dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh baru tiga kota saja yang telah meluncurkan program Smart City, yaitu Kota Langsa, Kota Banda Aceh dan Subulussalam. Dan dari semua itu, baru Kota Banda Aceh saja yang telah memiliki road map Smart City, sementara dua kota lainnya belum memiliki rencana induk walaupun sudah launching.

Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unsyiah, Dr. Hizir Sofyan selaku koordinator tim penyusunan rencana induk Aceh smart province mengatakan, implementasi Aceh smart province berawal dari kerja sama (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan Unsyiah dan ITS pada Oktober 2018. Kerja sama diluncurkan MoU antara Pemerintah

Aceh dengan BPPT pada 4 Oktober 2019. Karenanya, program ini mendapat dukungan penuh dari semua pihak terkait.

Pada FGD pertama, tambah Hizir, tim penyusun melakukan analisis kesiapan daerah seperti struktur (SDM, tata kelola/pamong, anggaran), infrastruktur (fisik, sosial, TIK), dan suprastruktur (kebijakan, lembaga, pelaksanaan) yang dianalisa menggunakan metode SWOT (strength, weakness, opportunity dan threat) untuk mendapatkan strategi-strategi yang bisa diterapkan dan disesuaikan dengan RPJMA 2017-2022. Sementara pada FGD kedua, mereka melakukan analisis visi misi Aceh smart province dan renstra SKPA. Visi misi dari Aceh smart province sendiri adalah "Aceh hebat yang inovatif dan kompetitif".

Smart Province bisa menjadi salah satu pintu menuju Aceh Hebat. Menurut Hizir, Aceh sangat berpotensi menjadi daerah yang dikenal luas, branding Aceh sudah sangat luar biasa, baik itu karena kopinya yang terkenal, atau karena musibah besar tsunami 2004.

"Sekarang yang paling penting membangun pola pikir kita, bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Mari kita terapkan masyarakat 5.0, dimana segala sesuatu yang kita lakukan dengan bantuan teknologi bermuara pada kemashlahatan masyarakat," tegasnya.

Hizir menargetkan Aceh smart province bisa diterapkan mulai 2020. Selain itu, di tahun yang sama ia juga akan menyusun masterplan smart city untuk tiga Kabupaten/Kota di Aceh yang dianggap paling siap untuk diterapkan. Sementara masterplan untuk Kota Banda Aceh sudah selesai disusun. (\*)

## Plt Gubernur Dukung Aceh Segera Jadi Smart Province

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung Tanah Rengong segera menjadi Smart Province atau Provinsi Pintar guna mencapai tujuan 'Aceh Hebat yang Inovatif dan Kompetitif.' Smart Province adalah program yang digagas untuk mempermudah akses informasi yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat sehingga pelayanan publik dapat lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

"Ke depan kita sudah bisa menyusun secara akurat dan efektif serta harus berbasis kemanfaatan. Bagaimana semua ini bisa dieksekusi dan menghasilkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat," ujar Nova saat menerima audiensi tim Unsyiah yang merupakan peny-

usun rencana induk Aceh smart province di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Selasa (31/12).

Menurut Nova, membangun serta mengembangkan sistem elektronik harus dilakukan untuk mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet of Things (IoT) guna mengelola aset-aset yang ada.

Kedatangan tim Unsyiah dipimpin Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Perencanaan, Dr. Hizir Sofyan untuk beraudiensi dan menjelaskan perkembangan program tersebut.

### 6 Komponen Smart Province

Dr. Hizir Sofyan menjelaskan Smart Province merupakan satu kesatuan yang utuh dari

terbentuknya smart city. "Smart government diharapkan dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintah yang cepat, sigap dan terukur, transparan, partisipatif dan komunikatif melalui kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada peningkatan pelayanan publik dalam segala sektor," ujar Dr. Hizir.

Sedangkan smart branding bertujuan mewujudkan wisata daerah berlandaskan syariat islam yang ramah terhadap lingkungan dan pengunjung serta berkualitas.

Sementara smart economy bertujuan mewujudkan sektor industri di setiap daerah dengan mengacu pada tata letak, cuaca dan iklim daerah sehingga menghasilkan produk berkualitas yang

mampu bersaing secara global.

Dr. Hizir melanjutkan, smart living diharapkan dapat mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menerapkan pola hidup sehat yang islami melalui kebijakan dan sosialisasi sehingga terciptanya keharmonisan dalam masyarakat.

Smart society bertujuan mewujudkan lingkungan yang aman dengan menumbuhkan kembali sifat sosial, kreatif dan bekerjasama di dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang bermartabat.

Terakhir, smart environment dengan tujuan mewujudkan sistem tata kelola limbah dan energi yang ramah lingkungan, hijau, bersih, terarah dan berkelanjutan. (\*)



## Pemerintah Aceh Dukung Penuh Berkembangnya Produk UMKM

**T**IGA armada berisi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikirim untuk didistribusikan ke berbagai daerah di Aceh dan Medan, Sumatera Utara, Jum'at (31/01/2020). Pendistribusian itu dilakukan melalui Asosiasi Saudagar Industri Aceh (ASIA).

Pelepasan perdana tiga armada itu dilakukan langsung oleh Plt Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh, Dyah Erti Idawati serta disaksikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Wildan dan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh,

Muslem Yacob dan Direktur BPR Mustaqim, Sri Hartati.

Pelepasan armada dilakukan usai Dyah Erti melakukan seremonial peusijek (tepung tawar). Pemerintah Aceh sendiri mendukung penuh berkembangnya produk UMKM di Aceh. Plt. Ketua Dekranasda Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan imbauan agar instansi pemerintah menggunakan produk UMKM dalam setiap kegiatan pemerintahan.

"Perhotelan di Banda Aceh juga sudah memakai produk Aceh

dan produk UMKM juga dipamerkan di sana. Itu mekanisme sumbangsih masyarakat Aceh untuk membantu perekonomian kita," kata Dyah.

Dyah mengatakan, sesuai dengan instruksi Plt. Gubernur Aceh, bahwa background pembangunan perekonomian Aceh adalah membangkitkan UMKM, sehingga dengan itu bisa merekrut ribuan tenaga kerja yang akhirnya bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dyah menegaskan, Pemerintah Aceh mensupport penuh kebangkitan UMKM.

"Kalau pengusaha sudah berkecenderungan keluar dari kemiskinan itu akan terjadi. Kita harus ingat bahwa kemiskinan bukan tugas satu orang tapi setiap kita punya kontribusi dari kemiskinan," kata Dyah.

Kadis Koperasi dan UKM Aceh, Wildan mengatakan, apa yang dilakukan oleh ASIA ini sebagai bentuk kontribusi bagi peningkatan ekonomi Aceh. Peluang memajukan UMKM dan pengentasan kemiskinan.

Wildan menyebutkan ASIA telah melakukan gerakan pemicu bagi koperasi-koperasi di Aceh dalam hal ekspor produk UMKM ke tingkat nasional. Ia berharap dengan beredarnya produk UMKM Aceh tersebut diikuti pula dengan pengembangan kualitas produk. Dengan itu produk asal Aceh bisa dan mampu bersaing dengan kompetitor lain di tingkat nasional.

Sementara itu Direktur Asosiasi Saudagar Industri Aceh (ASIA), Teuku Dharul Bawadi, mengatakan sinergitas pengusaha UMKM dengan Pemerintah Aceh sangatlah dirasakan manfaatnya.

Dengan kerja sama yang baik itu, banyak produk-produk Aceh yang mulai dikenal hingga ke pasar nasional. "Kita ingin dengan sinergitas ini, kita bisa sama-sama membawa produk Aceh ke nasional, dengan asumsi ke depan banyak produk Aceh yang masuk ke pasar nasional," kata Bawadi.

Bawadi menyebutkan, UMKM mampu meraup ribuan tenaga kerja di Aceh. Di organisasi ASIA saja, kata dia, tercatat 380 mitra dengan total 6.000 tenaga kerja. Artinya berkembangnya UMKM bisa merangkul pengangguran yang akhirnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Selain Dyah dan Wildan, hadir juga dalam pelepasan produk UMKM itu Plt Kadis Disperindag Muslim Yakob dan. (\*)

## Diskominfo Aceh Dorong Peningkatan Literasi Digital

PENGUNAAN internet di Indonesia meningkat sangat pesat. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di awal tahun 2019 tercatat pengguna Internet di Indonesia mencapai angka 171 juta jiwa dan akan terus bertambah.

"Ini berarti 65% penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Dapat dipastikan, pengguna internet itu sebagian besar merupakan pengguna media sosial," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf, BHSC MA pada Seminar Nasional Literasi Privasi dan Keamanan Digital di Gedung DiLo ITLC Banda Aceh, Rabu (15/01/2020).

Tercatat, YouTube, Facebook dan Instagram adalah aplikasi jejaring sosial paling banyak digunakan oleh warganet Indonesia, dan Messenger WhatsApp adalah yang paling banyak digunakan, yaitu oleh 83% dari total warganet Indonesia.

Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat melalui teknologi digital ini, seperti E-Commerce semakin berkembang yang menciptakan banyak peluang usaha baru bagi penggunanya, hal ini didominasi anak-anak muda yang membuka perusahaan

rintis (start up) dengan melihat potensi pasar yang ada.

Perkembangan internet, lanjutnya, juga menjadi hal baru bagi para pelajar dalam mendapatkan sumber informasi untuk memperkuat pengetahuan yang didapat di bangku sekolah.

Muncul pula banyak "profesi" baru seperti YouTuber atau Selebgram dengan penghasilan yang menggiurkan dan masih banyak lagi hal positif yang dilakukan warganet Indonesia ini di dunia siber.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, terus mendorong peningkatan penggunaan internet yang positif. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan literasi digital masyarakat Aceh. Bagi para pelajar ada kegiatan tahunan yang bertema bijak menggunakan medsos.

"Selain kegiatan literasi digital, terdapat juga kegiatan-kegiatan persandian untuk keamanan informasi, seperti kegiatan kontra penginderaan pada ruang pimpinan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda, serta kegiatan jamming saat kunjungan Presiden/Wakil Presiden," sebutnya.

Perkembangan teknologi internet ini, ungkap Marwan, bagaikan pisau bermata dua. Selain



banyak hal positif yang dapat dilakukan, terdapat pula hal negatif berkecenderungan di internet.

Konten negatif, penipuan, perundungan, ujaran kebencian, kejahatan siber dan masih banyak lagi menjadi tantangan bersama yang harus kita hadapi di dunia internet. Termasuk diantaranya pelanggaran privasi dan pencurian data pribadi.

"Presiden Jokowi, dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019, menyampaikan 'data adalah jenis kekayaan baru dari bangsa Indonesia dan hak warga negara atas data pribadi

harus dilindungi', ini artinya data pribadi kita semakin rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti jual beli data pribadi, kasus penipuan pinjaman online, ancaman penyebaran data pribadi, dan sebagainya, merupakan beberapa kasus yang muncul di dunia siber kita," jelasnya.

Maka itu diperlukan adanya upaya bersama, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sektor bisnis, lembaga masyarakat, komunitas, akademisi para stakeholder

lainnya untuk secara bersama-sama mengantisipasi terkait keamanan informasi.

Marwan mengungkapkan, literasi digital tidak hanya berbicara kemampuan menggunakan atau mengoperasikan beragam perangkat teknologi digital, tapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis dan kreatif, mampu memilah informasi yang benar dan tidak benar, kemampuan untuk berkolaborasi, termasuk diantaranya kemampuan menjaga privasi dan keamanan di dunia digital. (\*)

# Sinergi Lintas Sektoral Kunci Sukses Program Dekranasda

**S**INERGITAS lintas sektoral sangat berpengaruh besar dalam upaya pengoptimalan kualitas dan produktifitas hasil kerajinan dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Aceh.

“Dengan kerja sama antara Dekranasda dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang terkait dapat menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna/terlaksana dengan baik dan tentunya hal ini akan berdampak baik sehingga membawa Dekranasda Aceh lebih maju lagi,” kata Plt. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh, Dyah Erti Idawati, dalam Rapat Kerja awal Dekranasda Aceh tahun 2020 bersama SKPA terkait di Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (30/01/2020).

Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, Jamaluddin, Plt. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Muslem Yacob, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto.

Dalam rapat kerja Dekranasda Aceh bersama seluruh SKPA terkait yang juga menja-

bat sebagai ketua bidang yang bertanggung jawab dalam kepengurusan Dekranasda Aceh tersebut, memaparkan tupoksi dan komitmennya dalam memajukan organisasi yang mengembangkan produk kerajinan dan usaha kecil tersebut.

Ia berharap, melalui rapat awal tersebut dapat memperjelas tupoksi dan komitmen dari masing-masing Kabid pengurus Dekranasda Aceh.

Sehingga tugas utama Dekranasda dalam memberdayakan pengrajin-pengrajin di Aceh dapat tercapai dengan baik serta mampu memasarkan hasil kerajinan tersebut di pasar nasional bahkan internasional.

Sebagaimana yang tertuang dalam salah satu visi dan misi Dekranasda Aceh yaitu memajukan dan memakmurkan pengrajin Aceh serta melindungi industri kerajinan dalam kompetisi pasar global.

Pada kesempatan itu Dyah Erti juga menyampaikan, kepada seluruh pengurus yang menjabat saat ini, untuk terus melakukan terobosan dan inovasi guna memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya pengrajin Aceh.

“Kepada kepala SKPA



Plt Ketua Dekranasda Aceh, Dyah Erti Idawati, memimpin Rapat Kerja Tim Inti Dekranasda Aceh, di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Kamis (30/01/2020).

yang terkait, harusnya membuat program yang berfikir out of the box yang dinilai unik, sehingga menarik wisatawan agar mau membeli atau menghabiskan uangnya untuk produk Aceh,” katanya.

Selain itu dalam pertemuan tersebut Dyah Erti men-

gatakan, bahwa dalam waktu dekat Dekranasda Aceh akan mengikuti event International Handicraft Trade Fair (INACRAFT 2020) yang rencananya kegiatan tersebut akan digelar pada April mendatang di Jakarta. Aceh sendiri didapuk menjadi ikon utama dalam

perhelatan pameran bertaraf internasional tersebut.

“Saya ingin even besar ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai ajang promosi untuk pariwisata kita. Jadi optimalkan pelaksanaan even ini untuk menunjukkan pada dunia tentang Aceh,” harap Dyah. (\*)



## Dekranasda Bantu Pengrajin di Aceh Besar

**PELAKSANA** Tugas (Plt) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh, Dyah Erti Idawati, menyerahkan bantuan alat bantu produksi anyaman bili kepada para pengrajin di sejumlah desa di Kabupaten Aceh Besar.

“Dengan peralatan yang diberikan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan perekonomian pengrajin, saya berharap dengan peralatan yang baru pendapatan semakin bertambah,” kata Dyah Erti Idawati, saat menyerahkan bantuan untuk pengrajin anyaman bili di Desa Lam Girek, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Rabu (29/01/2020).

Dyah mengatakan, sangat senang bisa bertemu langsung dengan para pengrajin. Dengan demikian, kata dia, pihaknya dapat mendengarkan langsung

keluh kesah para pengrajin di desa.

Dyah Erti mengatakan, Dekranasda Aceh akan terus memberdayakan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan para pengrajin. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan di Aceh.

“Selain dari Dekranasda, kami juga berharap Keuchik melalui anggaran dana desa juga dapat memberdayakan masyarakat,” tutur Dyah.

Dalam kesempatan itu, istri Plt Gubernur Aceh itu meminta agar produk yang dihasilkan para pengrajin dapat dimodifikasi sesuai dengan selera zaman, baik dari segi desain maupun warna.

“Kualitas maupun kuantitas produk harus dapat ditingkatkan, kadang banyak

orang tertarik dengan produk kerajinan kita tapi kita sering tidak mampu mencukupi jumlah permintaan,” kata Dyah.

Selain itu, Dyah juga meminta para pengrajin mentransfer kemampuannya kepada generasi muda. “Kerajinan ini juga perlu diturunkan pada anak muda agar ada regenerasi. Di tangan anak muda nantinya produk akan lebih trendi sesuai keadaan zaman,” ujar dia.

Sementara itu, Keuchik Gampong Lam Girek, Khalid, berterima kasih kepada Dekranasda Aceh yang telah memberikan bantuan untuk para pengrajin di desanya. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengrajin.

Khalid mengaku, selama ini para pengrajin di desanya acap kali sulit mendapatkan bahan baku anyaman bili. Sebab, populasi tumbuhan bili mulai berkurang di Gampong Lam Girek, sehingga pengrajin setempat harus mencari jauh ke tempat lain. “Oleh karena itu kami berharap bantuan dan bimbingan ibu Plt Gubernur,” ujar Khalid.

Menanggapi hal tersebut, istri orang nomor satu di Aceh itu berjanji akan meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk melakukan budidaya tumbuhan bili di sejumlah tempat. Ia berharap, produksi anyaman bili dapat terus berlanjut.

Penerima Bantuan Berterimakasih Salah satu penerima bantuan di Desa Lam Girek, Masyitah, berterima kasih kepada Dekranasda Aceh atas bantuan peralatan penunjang pembuatan anyaman bili yang ia terima itu. Ia mengatakan, bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk membantu produksi kerajinan anyaman bili.

Profesi sebagai pengrajin anyaman bili sudah cukup lama digeluti Masyitah. Ia mulai melakukan usaha kerajinan itu sejak usia muda. “Saya lahir saat Jepang datang kemari, kemudian pada saat memiliki anak satu saya mulai menggeluti kerajinan ini,” kata Masyitah.

Saat masih muda, kata Masyitah, ia mampu menghasilkan sampai empat barang produksi anyaman bili. Ada berbagai macam barang yang ia produksi dari anyaman tersebut, seperti nampan, dompet, tudung saji dan berbagai barang lainnya.

Untuk menjual barangnya itu, Masyitah setiap harinya berkeliling ke sejumlah Gampong di Kecamatan Lhoknga. Selain itu, produknya itu juga sering dipesan bila ada hajatan pesta perkawinan.

Namun, seiring berjalannya waktu, produk kerajinan Masyitah mulai menurun. Usia yang sudah tua sudah tidak memungkinkan lagi untuk berjualan keliling. Kini, produknya dititip di Keude Bieng, sebuah pusat penjualan produk kerajinan anyaman bili dan rotan di Kabupaten Aceh Besar.

Selain Masyitah, dua pengrajin lain di Gampong Lam Girek juga mendapatkan bantuan. Mereka adalah Nurhayati dan Nurbayani.

Usai dari Gampong Lam Girek, Dyah Erti Idawati juga menyerahkan bantuan alat bantu produksi untuk pengrajin anyaman bili di Desa Lampanah Tunong, Kecamatan Indrapuri.

Sementara di Desa Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Dekranasda Aceh menyerahkan bantuan benang tenun untuk kelompok pengrajin Mutiara Songket di desa tersebut. (\*)